

**SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK  
DI DESA BALAM MERAH KECAMATAN BUNUT  
KABUPATEN PELALAWAN**



**OLEH**

**ERMA DAMAYANTI**

**NIM : 10875004545**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU**

**2013**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN FISIK  
DIDESA BALAM MERAH KECAMATAN BUNUT  
KABUPATEN PELALAWAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensive Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

**OLEH**

**ERMA DAMAYANTI**  
**NIM : 10875004545**



**PROGRAM S.1  
JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
PEKANBARU  
2013**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI  
MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA  
DIDESA BALAM MERAH KECAMATAN BUNUT  
KABUPATEN PELALAWAN**

**ABSTRAK**

**Oleh :**

**Erma Damayanti**

*Perencanaan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan memiliki peran yang strategis dalam kerangka otonomi daerah, karena pembangunan desa merupakan dasar dari pembangunan nasional dan partisipasi masyarakat merupakan modal utama bagi keberhasilan pembangunan. Dimana pembangunan desa bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah semata namun merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa didesa balam merah kecamatan bunut kabupaten pelalawan. Sejalan dengan tujuan penelitian diatas maka populasi penelitian ini adalah masyarakat setempat, sedangkan teknik penarikan sampel menggunakan teknik random sampling (sampel acak). Data yang digunakan yaitu data primer yakni data yang diperoleh langsung dari narasumber dan informan melalui kuesioner dan wawancara. Kemudian data sekunder yakni data yang sudah diolah dalam bentuk catatan-catatan. Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat yang paling nampak terlihat adalah faktor sarana prasarana (39,78%) dan faktor ekonomi (38,17%), sedangkan faktor pendidikan, faktor budaya, faktor pelaksana, pekerjaan, organisasi dan manajemen hanya sebagian saja yang mengatakan setuju. Sesuai dari hasil penelitian ini, maka pemerintah harus lebih memberikan perhatian terutama dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan juga memberikan dorongan kepada masyarakat agar juga ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa.*

*Kata kunci : partisipasi masyarakat, pembangunan desa*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>PERSETUJUAN</b> .....	i
<b>PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xi
<b>BAB IPENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.5 Sistematika Penelitian .....	7
<b>BAB IITELAAH PUSTAKA</b>	
2.1 Partisipasi Masyarakat .....	9
2.2 Bentuk dan Tipe Partisipasi .....	16
2.3 Partisipasi Menurut Pandangan Islam .....	20
2.4 Pembangunan .....	20
2.5 Desa .....	24
2.6 Faktor-Faktor               Yang               Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa .....	25
2.7 Hipotesis .....	28
2.8 Depenisi konsep .....	28
2.9 Konsep Operasional .....	29
2.10 Variabel Penelitian .....	32
<b>BAB IIIMETODOLOGI PENELITIAN</b>	
3.1 Lokasi dan waktu Penelitian .....	33
3.2 Populasi dan Sampel .....	33
3.3 Jenis data dan Sumber data .....	34
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	35
3.5 Teknik Analisa Data .....	35
<b>BAB IVGAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
4.1 Keadaan Geografis Desa Balam Merah .....	37
4.2 Keadaan Penduduk .....	38
4.3 Mata Pencarian Penduduk .....	39
4.4 Pendidikan .....	40
4.5 Agama .....	41
4.6 Suku Budaya .....	41
4.7 Pemerintahan .....	42

## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

5.1 Identitas Responden .....	48
5.1.1 Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin.....	48
5.1.2 Keadaan responden berdasarkan kelompok umur.....	49
5.1.3 Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	49
5.1.4 Keadaan responden berdasarkan jenis pekerjaan .....	50
5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Tahun 2012 .....	51
5.2.1. Ekonomi .....	52
5.2.2. Sosial Budaya.....	58
5.2.3. Sarana dan prasarana.....	62
5.2.4. Pendidikan.....	66
5.2.5. Administrator Atau Pelaksana Partisipasi (pemerintah dan masyarakat) .....	70
5.2.6. Pekerjaan .....	75
5.2.7. Organisasi Dan Manajemen .....	79
5.3 Rekaputilasi Variabel Penelitian .....	83
5.4 Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dengan cara.....	85

## **BAB VI PENUTUP**

6.1 Kesimpulan .....	87
6.2 Saran.....	88

## **DAFTAR PUSTAKA**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 : Jenis pembangunan Desa Dengan Menggunakan Sumber Dana Dari Bantuan Pemerintah Dan Swadaya Masyarakat Desa Balam Merah Di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan.....	4
Tabel I.2 : Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Melalui kehadiran dalam Kegiatan Gotong-royong Didesa Balam Merah .....	5
Tabel 1.3 : Rencana Kegiatan Pembangunan Desa pada Musyawarah Rencana Pelaksanaan Pembangunan Didesa Balam Merah Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan.....	6
Tabel 1.2 : Tipe Partisipasi .....	18
Tabel 4.1 : Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin.....	38
Tabel 4.2 : Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur.....	38
Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan .....	39
Tabel 4.4 : Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	40
Tabel 4.5 : Jumlah Sarana Ibadah .....	41
Tabel 4.6 : Jumlah penduduk Menurut Suku .....	42
Tabel 5.1 : Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Penelitian di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.....	48
Tabel 5.2 : Keadaan responden penelitian menurut kelompok umur Didesa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.....	49
Tabel 5.3 : Jumlah tingkat pendidikan responden penelitian di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, 2012.....	50
Tabel 5.4 : Jumlah keadaan jenis pekerjaan responden penelitian di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan .....	51
Tabel 5.5 : Tanggapan Responden Tentang Tingkat Pendapatan Masyarakat yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa .....	53
Tabel 5.6 : Tanggapan Responden Tentang Jenis Pekerjaan Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Desa.....	54
Tabel 5.7 : Tanggapan Responden Tentang tingkat Pendidikan Masyarakat Berpengaruh Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa .....	56

Tabel 5.8 :	Rekapitulasi tanggapan Responden Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dibidang Ekonomi.....	57
Tabel 5.9 :	Tanggapan Responden Tentang Tingkat Kematangan Umur Masyarakat Desa .....	58
Tabel 5.10 :	Tanggapan Responden Tentang Sistem Sosial Atau Kebudayaan Yang Mempunyai Arti Dalam Masyarakat.....	59
Tabel 5.11 :	Tanggapan Responden Tentang Sistem Kepercayaan (agama) Masyarakat Desa.....	60
Tabel 5.12 :	Rekapitulasi tanggapan Responden Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Dalam Bidang Sosial Budaya .....	61
Tabel 5.13 :	Sarana dan prasarana yang ada di kantor Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.....	62
Tabel 5.14 :	Tanggapan Responden Tentang Sarana Olahraga Yang Tersedia di Desa Balam Merah .....	63
Tabel 5.15 :	Tanggapan Responden Tentang Sarana Transportasi Yang Tersedia .....	63
Tabel 5.16 :	Tanggapan Responden Tentang Sarana Yang Ada di Kantor Desa .....	64
Tabel 5.17 :	Rekapitulasi tanggapan Responden Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Dalam Pembangunan Desa Dalam Bidang Sarana Dan Prasarana .....	65
Tabel 5.18 :	Tanggapan Responden Tentang Masalah Kurangnya Minat Masyarakat Dalam Menyekolahkan Anak Mereka, Kebanyakan Masyarakat Hanya Tamat Sekolah Dasar .....	67
Tabel 5.19 :	Tanggapan Responden Tentang Masalah Kurangnya Kualitas Pendidikan .....	68
Tabel 5.20 :	Tanggapan Responden Tentang Tingkat Pendidikan Masyarakat Setempat Yang Rendah .....	68
Tabel 5.21 :	Rekapitulasi tanggapan Responden Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Dalam Pembangunan Desa Dalam Bidang Pendidikan .....	69
Tabel 5.22 :	Tanggapan Responden Tentang Ikut Andilnya Para Pelaksana Dalam Partisipasi Pembangunan Desa Dalam Bentuk Gotong-Royong .....	71
Tabel 5.23 :	Tanggapan Responden Tentang Ikut Andilnya Para Pelaksana Dalam Partisipasi Pembangunan Desa Dalam Bentuk Bantuan Dana .....	71

Tabel 5.24 :	Tanggapan Responden Tentang Ikut Andilnya Para Pelaksana Dalam Partisipasi Pembangunan Desa Dalam Memberikan Ide-Ide Yang Kreatif .....	72
Tabel 5.25 :	Rekapitulasi tanggapan Responden Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Apabila Dilihat Dari Administrator Pembangunan Atau Pelaksana Pembangunan .....	73
Tabel 5.26 :	Tanggapan Responden Tentang Pekerjaan Sehari-Hari Mereka Yaitu Bertani Atau Berkebun .....	75
Tabel 5.27 :	Tanggapan Responden Tentang Tidak Adanya Kerjasama Sesama Masyarakat Dalam Pekerjaan Untuk Pembangunan Desa .....	76
Tabel 5.28 :	Tanggapan Responden Tentang Pekerjaan Yang Apabila Dilakukan Dengan Disiplin Yang Tinggi Akan Mempengaruhi Partisipasi .....	77
Tabel 5.29 :	Rekapitulasi tanggapan Responden Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Apabila Dilihat Dari Pekerjaan Sehari-Hari Masyarakat Desa.....	78
Tabel 5.30 :	Tanggapan Responden Tentang Adanya Satuan-Satuan Organisasi Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Supaya Tercapainya Tujuan Bersama .....	79
Tabel 5.31 :	Tanggapan Responden Tentang Harus Adanya Dorongan Dari Pemerintah Untuk Masyarakat Dalam Partisipasi Pembangunan Desa 82	
Tabel 5.32 :	Tanggapan Responden Harus Terciptanya Pemerintahan Yang Baik .....	82
Tabel 5.33 :	Rekapitulasi tanggapan Responden Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Apabila Dilihat Dari Organisasi Dan Manajemen Yang Terbentuk Didesa .....	82
Tabel 5.34 :	Rekapitulasi Jumlah tanggapan Responden Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan .....	84



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana kearah yang lebih baik atau maju. Adapun tujuan dari pembangunan itu sendiri yaitu untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera baik materil maupun spritual. Agar dalam pelaksanaan pembangunan itu berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka didalam melaksanakan pembangunan keberhasilan pembangunan sangat ditunjang oleh manajemen pemerintahan yang baik. Salah satu fungsi manajemen adalah perencanaan yang terkoordinasi dan merupakan fungsi pertama dari administrasi dan manajemen. Karena tanpa adanya rencana maka tidak ada dasar untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka usaha pencapaian tujuan..

Pembangunan yang dilaksanakan di daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan nasional. pembangunan daerah adalah pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip dan jiwa masyarakat daerah dan dilaksanakan sepenuhnya oleh segenap komponen masyarakat daerah atas dasar potensi dan kekuatan yang dimiliki daerah.

Tujuan dari pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah setempat. Agar dalam pelaksanaan pembangunan di daerah dapat tercapai maka perlu adanya kerjasama yang dilakukan yaitu berupa partisipasi masyarakat. Dimana masyarakat memberikan atau menyumbangkan tenaga, dana, dan pikirannya.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa/kelurahan merupakan wilayah yang terkecil dimana desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul istimewa (UU No.32 Tahun 2004)

Pembangunan desa tidak terlepas dari unsur-unsur atau komponen-komponen pembentukan desa sebagai kesatuan kenegaraan dimana unsur-unsur atau komponen tersebut meliputi penduduk atau masyarakat desa, wilayah dan pemerintahan desa.

Pembangunan desa bukanlah merupakan tanggung jawab pemerintah semata, namun merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan.

Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka perimbangan kewajiban yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat desa. Dimana kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, memberikan bimbingan dan pengawasan sedangkan sebaliknya disandarkan pada kemampuan masyarakat desa itu sendiri. Dari pihak pemerintah berusaha untuk dapat memberikan bantuan materil kepada desa guna menghimpun dan mengintensifkan pelaksanaan kerja gotong-royong dan dilain pihak pemerintah membantu dalam mengusahakan Bertanggung jawab memupukkan modal bagi kebutuhan-kebutuhan produksi yang nyata di daerah pedesaan.

Syaprizal ( 1997:34) Selain ditunjang oleh manajemen pemerintahan yang baik, keberhasilan pembangunan juga sangat ditunjang oleh partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dapat berbentuk

tenaga (gotong-royong), dana dan pikiran (ide-ide). Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan kondisi-kondisi social budaya yang meliputi agama, komposisi umur dan keberbagaian etnik, social ekonomi yang meliputi tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan angkatan kerja. Kemudian kondisi politik dan keamanan yang meliputi pendidikan politik, partai politik dan kondisi yang kondusif.

Oleh karena itu, pemerintah mempunyai kewajiban meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan kondisi-- kondisi sosial budaya, ekonomi dan politik melalui kebijakan-kebijakan penting yang mampu mengangkat semaksimal mungkin potensi-potensi yang dimiliki daerah. Sehingga apabila tingkat partisipasi tinggi maka akan tercapai pembangunan yang baik.

Pembangunan pedesaan merupakan pembangunan yang diprakarsai melalui inisiatif masyarakat desa dan merupakan pembangunan partisipasi dari seluruh anggota masyarakat sehingga terwujudlah tujuan 'dari pembangunan desa itu sendiri.

Dari penjelasan diatas, dapat kita ketahui bahwa pembangunan yang dilaksanakan tersebut dapat diartikan sebagai salah satu usaha perubahan kearah pembaharuan menuju terciptanya kehidupan yang layak dan lebih baik yakni mensejahterakan kehidupan masyarakat secara adil dan merata.

Desa Balam Merah terletak dikecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Dimana sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bertani. Yang mana dalam pelaksanaan pembangunannya didesa Balam Merah masih

sangat kurang masih kurang jika dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Kecamatan Bunut tersebut, terutama sekali tingkat partisipasi masyarakatnya. Hal ini dapat terlihat pada tabel I.1.dibawah ini:

**Tabel I.1 Jenis pembangunan Desa Dengan Menggunakan Sumber Dana perimbangan desa Dari Bantuan Pemerintah Dan Swadaya Masyarakat Desa Balam Merah Di Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan**

KEGIATAN	SUMBER DANA				
	Biaya (Rp)	Bantuan Pemerintah		Swadaya Masyarakat	
		Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pembuatan jalan lingkung	30. 000. 000/ 2 @	25.000.000	20.000.000	15.000.000	10.000.000
Pembangunan Musholla	95. 000.000/ 2@	85.000.000	65.000.000	45.000.000	30.000.000
Pembuatan pos ronda	15. 000.000/ 4@	10.000.000	10.000.000	5.000.000	5.000.000
JUMLAH		120.000.000	95.000.000	65.000.000	45.000.000

**Sumber :Kantor Kepala Desa Balam Merah 2012**

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa dana pembangunan dari masyarakat lebih kecil jika dibandingkan dengan bantuan pemerintah. Dimana dana yang diharapkan dari masyarakat seharusnya sebesar Rp.,65.000.000- tetapi pada kenyataanya hanya sebesar Rp. 45.000.000- hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa masih kurang terlebih dalam pemberian sumbangan dana.

Selain kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemberian sumbangan dana, partisipasi masyarakat dalam hal pemberian tenaga (gotong-royong) dan penyampaian pendapat (ide-ide) juga masih rendah. Ini dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini.

**Tabel I.2. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Melalui kehadiran dalam Kegiatan Gotong-royong Didesa Balam Merah**

No	Jenis kegiatan gotong-royong	Masyarakat yang diundang	Masyarakat yang hadir	Persentase (%)	Masyarakat yang tidak hadir	Persentase (%)
1	Pembuatan jalan lingkung	50 orang	18 orang	21 %	32 orang	50 %
2	Pembuatan mushola	50 orang	23 orang	30 %	27 orang	33 %
3	Pembuatan pos ronda	50 orang	21 orang	27 %	29 orang	34 %

**Sumber :Kantor kepala Desa Balam Merah 2012**

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa melalui kegiatan gorong-royong juga masih sangat rendah, ini dilihat dari tingkat absensi masyarakat yang datang saat diadakanya kegiatan gotong-royong. Dimana dalam pelaksanaan gotong-royong ini masyarakat yang datang hanya masyarakat yang sering hadir pada waktu terdahulu saja.

Pada perencanaan kegiatan pembangunan desa yang dimusyawarahkan juga terlihat suatu gejala yaitu kurangnya tingkatnya partisipasi masyarakat dalam masalah penyampaian ide-ide atau pendapat, terutama ide –ide tentang bagaimana caranya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan desa. Nampaknya masyarakat enggan untuk mengikuti musyawarah tersebut sehingga tidak terealisasinya semua yang telah dimusyawarahkan ini dapat dilihat pada tabel 1.3 dibawah ini.

**Tabel 1.3. Rencana Kegiatan Pembangunan Desa pada Musyawarah Rencana Pelaksanaan Pembangunan Didesa Balam Merah Kecamatan Bunut, Kabupaten Pelalawan**

No	Jenis Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan	
		Target	Realisasi
1	Pembuatan jalan lingkung	8 kali pelaksanaan	5 kali pelaksanaan
2	Pembangunan mushola	2 kali pelaksanaan	2 kali pelaksanaan
3	Pembuatan pos ronda	4 kali pelaksanaan	4 kali pelaksanaan
Jumlah		14 kali pelaksanaan	11 kali pelaksanaan

*Sumber: Kantor Kepala desa balam merah 2012*

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan musyawarah pelaksanaan pembangunan desa juga sangat kurang, pada rencana kegiatan musyawarah kegiatan tersebut seharusnya target yang telah direncanakan adalah delapan kali pertemuan tapi Cuma terealisasi lima kali pelaksanaan, disini bisa dilihat bahwa masyarakat sangat kurang dalam masalah penyampaian ide-ide atau pendapat.

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan Didesa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, maka peneliti berminat untuk mengangkat judul : “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Didesa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan
2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Didesa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

### **1.3 Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat Didesa Balam Merah kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui upayayang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Menjadikan bahan masukan dan sumbangan fikiran untuk pemerintah daerah
2. Sebagai Bahan informasi bagi para peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

### **1.5 Sistematika Penelitian**

Secara garis besar pembahasan dalam penulisan ini dibagi menjadi tiga pokok bahasan (BAB) dan masing-masing bab dibagi menjadi sub-sub seperti berikut.

## **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bab yang mana dalam bab ini berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan serta sistematika penulisan.

## **BAB II : KERANGKA TEORI**

Menguraikan tujuan pustaka mengenai partisipasi, faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, pembangunan desa, prinsip-prinsip partisipasi, swadaya masyarakat, penduduk yang merupakan teori-teori pendukung penulisan ini nantinya, yang merupakan deskripsi teori pada bab ini, selain itu dalam bab ini juga berisi, kerangka berpikir hipotesis, konsep operasional atau variabel.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Menguraikan tentang tempat dan waktu penulisan, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknis pengulan data, serta analisis data.

## **BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang geografi desa yang akan kita teliti Demografi, serta pemerintahan didesa tersebut.

## **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Didalam bab in memuat hasil dari penelitian pembahasan yang dilakukan

## **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini merupakan babpenutup, yang berisikan tentang kesimpulan dari hasil peneliti serta saran-saran yang diperlukan.



## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **2.1 Partisipasi Masyarakat**

Menurut Syahyuti (dalam Miftah, 2000:145) partisipasi adalah proses tumbuhnyakesadaran terhadap kesalinghubungan di antara stakeholders yang berbeda dalam masyarakat, yaitu antara kelompok-kelompok sosial dan komunitas dengan pengambil kebijakan dan lembaga-lembaga jasa lain. Partisipasi juga dapat didefinisikan sebagai proses dimana seluruh pihak dapat membentuk dan terlibat dalam seluruh inisiatif pembangunan.

Sedangkan Menurut Seligman Dan Edwin (dalam Hendra, 2008: 16) menyatakan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan suatu kesatuan untuk mengambil bagian dalam aktivitas yang dilakukan oleh susunan kesatuan yang lebih besar.

Dawam Raharjo (2000 : 28) Partisipasi diartikan sebagai hal keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan seseorang atau kelompok orang yang mendiami suatu wilayah tertentu yang mempunyai kepentingan yang sama, satu ikatan dan saling berhubungan satu sama lain untuk mengambil bagian dan bertanggung jawab dalam suatu kegiatan tertentu baik secara fisik maupun non fisik

Dengan adanya kerjasama tersebut maka masyarakat akan merasa memiliki hubungan yang lebih dekat sehingga akan merasa memiliki tanggung jawab dan tugas yang sama dalam mengembangkan tempat tinggal dan lingkungan tersebut.

Menurut Pasaribu dan Simanjuntak (1986 : 349 -352) ada beberapa wadah bagi terwujudnya partisipasi masyarakat, wadah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wadah partisipasi buah pikiran (yang diberikan dalam rapat), rapat yang dimaksud seperti musyawarah rencana pelaksanaan kegiatan pembangunan, seminar dan penataran-penataran
2. Wadah partisipasi tenaga yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan dan pembangunan desa.
3. Wadah partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan dan pembangunan desa.
4. Wadah partisipasi keterampilan dan kemahiran, yang diberikan orang untuk mendorong aneka ragam bentuk usaha dan industri.
5. Wadah partisipasi sosial yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban, misalnya turut arisan, koperasi, layad (dalam peristiwa kematian).

Alex Nitisemito (1982 : 20) Partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses kegiatan pembangunan baik dalam bentuk dana (uang), pikiran (ide-ide) maupun dalam bentuk tenaga (gotong-royong)

Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam menyumbang dana, pikiran dan Tenaga meyakini bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan dari setiap upaya pembangunan. Dari sini dapat diyakini oleh pemerintah bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu syarat utama untuk keberhasilan proses pembangunan tersebut. Partisipasi masyarakat dapat dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah kegiatan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Dawam Raharjomengutip pendapat Bintoro Tjokroamidjojo

(1983:94)mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan meliputi:

1. Keterlibatan dalam penentuan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Keterlibatan dalam memetik hasil dan memanfaatkan pembangunan.

Saparin (1997 : 44) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat penting, terutama dalam pembentukan dana masyarakat secara gotong-royong. Hal ini sangat diperlukan mengingat bahwa pembangunan tidak harus selalu dibiayai oleh pemerintah, tetapi harus pula dilandaskan pada kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menyediakan dana-dana yang diperlukan untuk membiayaisekaligus menunjang, kegiatan pembangunan tersebut

1. Keterlibatan dalam penentuan arah strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.
2. Keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Keterlibatan dalam memetik hasil dan memanfaatkan pembangunan.

Azam Awang Mengutip Pendapat Surbakti (1999 : 16) partisipasi masyarakat dalam rencana pembangunan harus sudah dimulai sejak saat perencanaan kemudian pelaksanaan dan seterusnya pemeliharaan.kegiatan masyarakatyang disebut partisipasi adalah prilaku lembaga dan para pejabat pemerintah yang bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik.

Hungtington (1997 : 270) partisipasi masyarakat merupakan ciri khas modernisasi dalam pembangunan. Kemajuan demokrasi dapat dilihat seberapa besar partisipasi masyarakat.

1. Partisipasi aktif masyarakat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijakan
2. Keterlibatan dalam memikul hasil dan mamfaat pembangunan secara berkeadilan.

Sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen (2011:58) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan.
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan.

3. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
4. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu.
5. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.
6. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan

perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut

3. Bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Apa yang ingin dicapai dengan adanya partisipasi yaitu untuk meningkatnya kemampuan (pemberdayaan) setiap orang yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam sebuah program pembangunan dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan dan kegiatan-kegiatan selanjutnya dalam jangka yang lebih panjang. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut menurut Monique Sumampouw,(2004: 106-107) adalah sebagai berikut:

- a) Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- b) Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- c) Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- d) Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

- e) Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- f) Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- g) Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Irene Siti (2011: 54-55) partisipasi masyarakat menekankan pada partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan meliputi :

- a) Partisipasi merupakan hak politik yang melekat pada warga sebagaimana hak politik lainnya. Hak itu tidak hilang ketika ia memberikan mandat pada orang lain untuk duduk dalam lembaga pemerintahan. Sedangkan hak politik sebagai hak asasi tetap melekat pada setiap individu yang bersangkutan.
- b) Partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan publik dilembaga-lembaga formal dapat untuk menutupi kegagalan demokrasi perwakilan. demokrasi perwakilan masih menyisakan beberapa kelemahan yang ditandai dengan keraguan sejauh mana orang yang dipilih dapat mempersentasekan kehendak masyarakat luas.

- c) Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintahan. Demokratisasi dan desentralisasi dinegara berkembang termasuk indonesia terjadi dalam situasi rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan dan lembaga pemerintah. Dengan melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan, maka diharapkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dapat terus ditingkatkan, dan meningkatnya kepercayaan warga dipercaya sebagai indikator penting bagi menguatnya dukungan dan keabsahan pemerintah yang berkuasa.

## **2.2 Bentuk dan Tipe Partisipasi**

Ada beberapa bentuk partisipasi yang dapat diberikan masyarakat dalam suatu program pembangunanyaitu :

- a) Partisipasi uang
- b) Partisipasi harta benda
- c) Partisipasi tenaga
- d) Partisipasi keterampilan
- e) Partisipasi buah pikiran
- f) Partisipasi sosial
- g) Partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
- h) dan partisipasi representatif

Dengan berbagai bentuk partisipasi yang telah disebutkan diatas, maka bentuk partisipasi dapat dikelompokkan menjadi 2 jenis, yaitu bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki wujud) dan juga bentuk partisipasi



yang diberikan dalam bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi representatif.

- a. Hamijoyo (2007:21) Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuandan Partisipasi buah pikiran lebih merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
- b. Pasaribu dan simanjuntak (2005:11) Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda, biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas, partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu program, Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu memberikan dorongan melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang membutuhkannya. Dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya dan Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.

- c. Chapin (2002:43) Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait dengan kepentingan bersama dan Sedangkan partisipasi representatif dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dijelaskan maka dapat diketahui bahwa Tipe partisipasi masyarakat pada dasarnya dapat kita sebut juga sebagai tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Ach wazir (1999:32-33)mengidentifikasi partisipasi masyarakat menjadi 7 (tujuh) tipe berdasarkan karakteristiknya, yaitu partisipasi pasif/manipulatif, partisipasi dengan cara memberikan informasi, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi untuk insentif materil, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan self mobilization. Untuk lebih jelasnya lihat Tabel 1.2.

**Tabel 1.2 Tipe Partisipasi**

No.	Tipologi	Karakteristik
1.	Partisipasi pasif/ manipulative	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi(b) Pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat (c) Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
2.	Partisipasi dengan cara memberikan informasi	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian seperti dalam kuesioner atau sejenisnya(b) Masyarakat tidak punya kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penyelesaian (c) Akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
3.	Partisipasi melalui konsultasi	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi (b) Orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya, dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat (c) Tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama;(d) Para

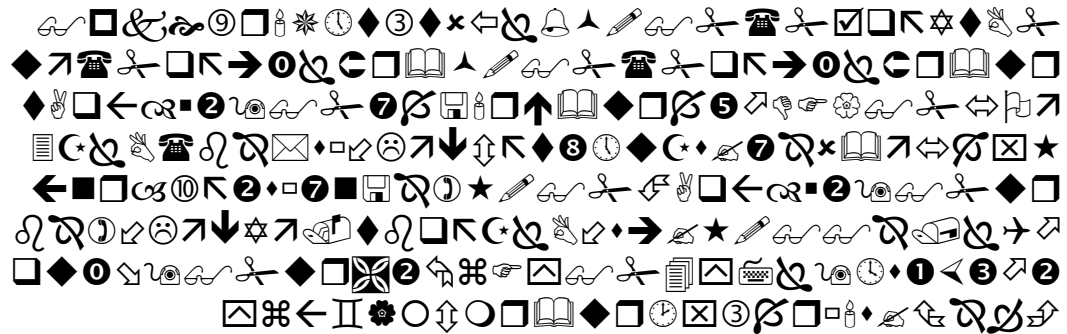
		profesional tidak berkewajiban mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.
4.	Partisipasi untuk insentif materil	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara menyediakan sumber daya seperti tenaga kerja, demi mendapatkan makanan, upah, ganti rugi, dan sebagainya (b) Masyarakat tidak dilibatkan dalam eksperimen atau proses pembelajarannya (c) Masyarakat tidak mempunyai andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada saat insentif yang disediakan/diterima habis.
5.	Partisipasi fungsional	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan membentuk kelompok untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan proyek;(b) Pembentukan kelompok (biasanya) setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati (c) Pada awalnya, kelompok masyarakat ini bergantung pada pihak luar (fasilitator, dll) tetapi pada saatnya mampu mandiri.
6.	Partisipasi interaktif	(a) Masyarakat berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaankegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada(b) Partisipasi ini cenderung melibatkan metode inter-disiplin yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis (c) Kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.
7.	Self mobilization	(a) Masyarakat berpartisipasi dengan mengambil inisiatif secara bebas (tidak dipengaruhi/ditekan pihak luar) untuk mengubah sistem-sistem atau nilai-nilai yang mereka miliki(b) Masyarakat mengembangkan kontakdengan lembaga-lembaga lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang dibutuhkan (c) Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Sumber : Ach wazir (1999 :32-33)

Pada dasarnya, tidak ada jaminan bahwa suatu program akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung sampai pada tipe macam apa partisipasi masyarakat dalam proses penerapannya. Artinya, sampai sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap suatu program sehingga ia turut berpartisipasi.

### 2.3 Partisipasi Menurut Pandangan Islam

Didalam pandangan Islam ataupun hukum Islam, partisipasi dijelaskan didalam surat An-Nisaa ayat 59 yang berbunyi :



Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul (nya), dan ulil amri diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang kemudian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.* (QS An-Nisaa’ :59).

### 2.4 Pembangunan

Pembangunan sebagai upaya suatu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan mempunyai beberapa implikasi :

1. Ia berarti memberikan perhatian terhadap kapasitas terhadap apa yang, ingin di lakukan untuk mengembangkan kemampuan dan tenaga guna membuat perubahan.
2. Ia mencakup keadilan (*equity*). Perhatian yang berat sebelah kepada kelompok tertentu akan memecah belah masyarakat dan mempengaruhi kepastiannya.
3. Penumbuhan kuasa dan wewenang dalam pengertian bahwa jika masyarakat mempunyai kuasa dan wewenang tertentu maka mereka akan

menerima manfaat pembangunan.

Menurut Sondang P.Siagian (2001:4) administrasi pembangunan merupakan rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju moderitas dalam rangka pembinaan bangsa.

Menurut Roger (dalam Zulkarimen Nasution 2002: 82) pembangunan merupakan sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu.

Kunarjo (1997:156) mengatakan bahwa Pembangunan Daerah adalah merupakan semua kegiatan pembangunan, baik yang termasuk maupun yang tidak termasuk urusan rumah tangga daerah yang meliputi berbagai sumber pembiayaan, baik yang berasal dari Pemerintah dan yang bersumber dari masyarakat.

Menurut Sukamto (1997: 53) bahwa keberhasilan suatu proyek pembangunan dapat di lihat:

1. Dari segi waktu.
2. Dari segi biaya.
3. Dari segi tenaga.

Menurut Sufian hamin (2003) pembangunan ialah sebagai suatu kegiatan atau usaha secara sadar usaha secara sadar terancam serta berkelanjutan untuk menibah dari suatu kondisi ke kondisi yang lebih baik.

Pembangunan dapat di cermati sebagai berikut: pembangunan pada dasarnya untuk meningkatkan taraf hidup atau tingkat kehidupan, dan dapat pula dikatakan bahwa pembangunan bertujuan untuk menaikkan mutu kehidupan karena mutu kehidupan dapat di artikan sebagai derajat untuk memenuhi

kebutuhan dasar (Soemarwoto, 1993:139).

Pembangunan adalah suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu, perencanaan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya (Haryono Sudriamunawar, 2002: 15).

(Taliz Duhu Ndraha 2004:14).Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang terus menerus di lakukan dan bertujuan menempatkan manusia pada posisi dan peranannya yang wajar dan mengembangkan sehingga ia berhubungan serasi dan dinamik ke luar dan berkembang serasi, selaras, dan seimbang di dalam.

Pembangunan juga dapat di artikan sebagai perubahan menuju pola-pola masyarakat yang memungkinkan realisasi yang lebih baik dari nilai-nilai kemanusiaan yang memungkinkan suatu masyarakat mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap lingkungannya dan terhadap tujuan politiknya, dan yang memungkinkan warganya memperoleh kontrol yang lebih terhadap mereka sendiri.

Ini berarti bahwa dalam pembangunan terdapat beberapa.persyaratan. Adapun persyaratan pembangunan yaitu :

1. Tujuan dari perubahan sosial dapat diakomoder oleh sistem nilai dan tradisi yang ada yang di anggap cukup memuaskan.
2. Tujuan pembangunan akan diterima masyarakat bila pembangunan tersebut dapat secara nyata memberikan keuntungan pada saat sekarang maupun pada saat mendatang.
3. Tujuan pembangunan akan lebih cepat diterima bila pembangunan tersebut di usulkan melalui orang-orang yang di hormati.
4. Tujuan pembangunan akan diterima bila hal itu secara menyeluruh sinkron

dengan pola-pola kepribadian individu anggota masyarakat.

5. Tujuan pembangunan akan di terima bila dirasakan pembangunan tersebut mudah diterima melalui proses belajar yang ada.

Pelaksanaan pembangunan akan berhasil apabila persyaratan tersebut telah dapat terpenuhi. Hal ini tidak lepas dari peranan pemimpinnya. Pembangunan desa dilaksanakan dalam rangka imbalan kewajiban yang sewajarnya antara pemerintah dan masyarakat desa. Kewajiban pemerintahan adalah menyediakan prasarana-prasarana, bimbingan dan pengawasan didasarkan kepada keterangan masyarakat desa itu sendiri. Dalam pembangunan desa bahwa pembangunan fisik sangat erat kaitannya dengan tujuan diadakan pembangunan itu sendiri yakni perubahan taraf hidup dalam masyarakat desa khususnya secara ekonomi, dimana, ketersediaannya prasarana sebagai salah satu bagian penting dari proses produksi, konsumsi dan distribusi dalam sisi kehidupan ekonomi masyarakat desa.

Defenisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa upaya dan kegiatan pembangunan merupakan upaya nasional Artinya menyelenggarakan kegiatan pembangunan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah desa dengan segala aparat dan seluruh jajaran meskipun harus diakui bahwa peranan pemerintah desa cukup dominan

Dari penjasan di atas dapat disimpulkan bahwa derasnya laju pembangunan di desa adalah kelincahan daya inisiatif dan keterampilan pemerintah desa dan di laksanakan dalam rangka keseimbangan yang sewajarnya antara lain pemerintah dan masyarakat.

## 2.5 Desa

Desa menurut UU No.32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul Desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Para ahli sejarah memandang desa sebagai sumber kekuatan dan ketahanan dasar dalam mempertahankan kemerdekaan (community power).

Menurut Muhandan Labolo, (2006 : 133) Desa dianggap sebagai sumber nilai luhur yang memiliki karakteristik seperti gotong royong, musyawarah mufakat dan kekeluargaan sehingga menimbulkan semboyan. Lahirnya pelebagaan politik di tingkat lokal (desa) yang merupakan organisasi formal diharapkan memberikan dinamika dan suasana politik yang lebih Demokratis, Otonom, Independen, dan sekaligus Prospektif dalam pengembangan demokrasi di tingkat desa.

Komunitas desa merupakan bagian integral dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selain sebagai tempat tinggal masyarakatnya sekaligus sebagai wadah terselenggaranya kekuasaan yang merupakan berlangsungnya pemerintahan yang berdasarkan hak istimewanya yaitu adat istiadat yang berbeda antara yang satu dengan lainnya.



Nilai-nilai adat inilah yang menjadi landasan bagi Otonomi Daerah yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional yang berada dalam wilayah Kabupaten.

Adapun kewenangan desa yang terdapat dalam Pasal 99 UU No. 32 Tahun 2004, Kewenangan desa mencakup:

1. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
2. Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan berlaku yang belum di laksanakan oleh daerah atau pemerintah.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintahan Provinsi, dan atau Pemerintah Kabupaten.

## **2.6 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program pembangunan, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu keberhasilan program pembangunan, namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat keberhasilan program pembangunan. Partisipasi dilihat dari tingkat.

### **a. Sosial ekonomi masyarakat**

Koentjoro Ningrat (1985:56) berpendapat bahwa pengaruh sosial ekonomi ada dua faktor yaitu :

1. Tingkat pendidikan
2. Tingkat pendapatan

Sudosono Sukino (1990:90) mengatakan bahwa pendidikan yang dimiliki masyarakat suatu daerah mulai dari jenjang pendidikan yang terendah hingga kepada jenjang yang lebih tinggi dapat membantu tingkat

perekonomian serta memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka dan memungkinkan masyarakat untuk dapat bertindak lebih lanjut dalam mengembangkan suatu keputusan. Sedangkan tingkat pendapatan yang diterima oleh masyarakat desa akan sangat mempengaruhi terhadap pembangunan yang dilaksanakan.

b. Partisipasi Dilihat Dari Tingkat Sosial Budaya

Selain dari tingkat social ekonomi, tingkat social budaya berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

Syaprizal (1997:34) mengatakan bahwa tingkat sosial budaya yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan meliputi :

1. Agama, agama merupakan system atau kepercayaan kepada Tuhan, atau nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang dengan yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.
2. Komposisi Umur, komposisi umur adalah susunan orang-orang yang tinggal dalam suatu daerah atau wilayah tertentu yang dibedakan menurut tingkat umurnya.
3. Keberbagaian Etnik, Sedangkan keberbagaian etnik merupakan kelompok sosial dalam sistem sosial atau kebudayaan yang mempunyai arti atau kedudukan tertentu karena keturunan, adat, agama, bahasa dan sebagainya.

(Josef Riwu Kawo2010: 120-133) pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan, politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila

merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam suatu negara. Jadi tanpa adanya partisipasi dari masyarakat pembangunan itu tidak akan berhasil dan dia juga mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa terdiri dari beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal :

1. Faktor internal (dari dalam masyarakat) Faktor-faktor internal adalah berasal dari dalam kelompok masyarakat sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya. Tingkah laku individu berhubungan erat atau ditentukan oleh ciri-ciri sosiologis masyarakat tersebut, termasuk didalamnya pekerjaan.

Secara teoritis, terdapat hubungan antara ciri-ciri individu dengan tingkat partisipasi, seperti usia, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, lamanya menjadi anggota masyarakat, besarnya pendapatan, keterlibatan dalam kegiatan pembangunan akan sangat berpengaruh pada partisipasi

2. Faktor eksternal

Faktor eksternal adalah berasal dari luar kelompok masyarakat yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat yaitu menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah pelaksana (manusia), peralatan (sarana), keahlian (tingkat pendidikan), pekerjaan masyarakat, organisasi dan manajemen.

Menurut Sastropetro (1985:20), faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah pendidikan, penginter prestasian yang dangkal terhadap agama, tujuan serta organisasi penduduk

seperti halnya lebih berorientasi pada kebijaksanaan dan lebih berorientasi pada teknisTingkatan kedudukan sosial.

## 2.7 Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan suatu hipotesis sebagai berikut *"Diduga faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan didesa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan adalah: ekonomi,sosial budaya, sarana, pendidikan, pelaksana,pekerjaan,organisasi dan manajemen.*

## 2.8 Depenisi konsep

Agar tidak terjadi kekeliruan mengenai pengertian tentang konsep yang digunakan, maka berikut ini akan dijelaskan dari masing-masing konsep tersebut :

### a. Partisipasi masyarakat

Partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu. Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama.

### b. Pembangunan desa

Pembangunan adalah suatu usaha perubahan untuk menuju keadaan lebih baik berdasarkan kepada norma-norma tertentu,

perencanaan pendayagunaan potensi alam, manusia dan sosial budaya atau bisa juga disebut suatu proses kegiatan pembaharuan yang kontiniu dan terus-menerus dari suatu keadaan yang dianggap lebih baik. Proses dimana usaha-usaha masyarakat yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa dalam proses pembangunan, terdapat adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dimana kegiatan tersebut selalu mempunyai keterkaitan satu sama lainnya dan mempunyai fase tersebut.

#### c. Pengertian Desa

Desa menurut UU No.32 Tahun 2004 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## 2.9 Konsep Operasional

Konsep operasional merupakan suatu cara untuk mengukur variabel-variabel dan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami. Variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan :

Untuk lebih jelas mengenai variabel penelitian ini dapat dilihat dibawah ini : (Josef Riwu Kawo2010: 120-133) pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan, politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila

merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan :

1. Faktor ekonomi

- a. Tingkat pendapatan, yaitu jumlah pendapatan yang diterima masyarakat desa.
- b. Jenis pekerjaan, yaitu pekerjaan yang dimiliki oleh masyarakat desa.
- c. Tingkat pendidikan, yaitu jenjang pendidikan yang pernah diikuti atau ditempuh oleh masyarakat desa.

2. Faktor etnik(budaya) yaitu berupa :

- a. Tingkat umur, yaitu apabila masyarakat desa mempunyai usia yang cukup matang dalam melaksanakan pembangunan.
- b. Etnik atau budaya, yaitu system social atau kebudayaan yang mempunyai arti dalam masyarakat.
- c. Agama, yaitu sistem kepercayaan yang dianut masyarakat.

3. Faktor sarana dan prasarana

- a. Sarana olah raga, yaitu apabila sarana olah raga lengkap maka menciptakan masyarakat yang sehat.
- b. Transportasi, yaitu apabila transportasi memadai maka waktu tidak akan banyak terbuang dalam menyelesaikan tugas.
- c. Alat-alat kantor, yaitu apabila sarana kantor memadai maka pekerjaan akan terselesaikan tepat pada waktunya.

4. Faktor Pendidikan

- a. Kurangnya minat masyarakat untuk sekolah.

- b. Sangat kurangnya kualitas pendidikan.
  - c. Apabila tingkat pendidikan masyarakat tinggi maka dapat menyadarkan masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan.
5. Pelaksana dan administrator (pemerintah/masyarakat)
- a. Memberikan bantuan tenaga untuk pelaksanaan pembangunan yaitu ikut sertanya masyarakat dalam gotong-royong melaksanakan pembangunan.
  - b. Memberikan bantuan berupa uang atau benda untuk pelaksanaan pembangunan yaitu kemampuan masyarakat dalam memberikan bantuan uang atau benda untuk menambah dana bantuan pembangunan.
  - c. Memberikan ide atau masukan-masukan agar terlaksananya pembangunan yang efektif.
6. Faktor Pekerjaan
- a. Mayoritas pekerjaan masyarakat bertani maka mereka lebih mementingkan kebutuhan mereka daripada ikut berpartisipasi.
  - b. Tidak adanya kerjasama(gotong-royong) atau saling membantu dalam pekerjaan.
  - c. Lebih banyaknya masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka tidak ikut berpartisipasi
7. Organisasi dan manajemen
- a. Adanya satuan-satuan organisasi antara masyarakat dengan pemerintah supaya tercapainya tujuan bersama.

- b. Adanya dorongan dari pemerintah untuk masyarakat dalam partisipasi pembangunan.
- c. Menciptakan suatu pemerintahan yang baik.

#### **2.10 Variabel Penelitian**

Adapun variabel yang dimaksudkan penulis dalam penelitian ini adalah: Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Desa Didesa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

(Josef Riwu Kawo2010: 120-133) pembangunan yang meliputi segala segi kehidupan, politik, ekonomi dan sosial budaya itu baru akan berhasil apabila merupakan kegiatan yang melibatkan partisipasi dari seluruh rakyat didalam suatu negara. indikatornya yaitu:

- 1. Ekonomi
- 2. Sosial budaya
- 3. Sarana dan prasarana
- 4. Pendidikan
- 5. Pelaksana
- 6. pekerjaan
- 7. Organisasi dan manajemen



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Lokasi dan waktu Penelitian**

Sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan, maka penelitian ini dilakukan di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan. Dilakukannya penelitian di desa ini karena alasan Desa Balam Merah ini pembangunan desanya kurang berhasil. Dan waktu penelitiannya dilakukannya mulai dari bulan februari sampai sampai bulan september

#### **3.2 Populasi dan Sampel**

##### **a. Populasi**

Menurut (taliziduhu ndara), bahwa himpunan semua hal yang ingin diketahui dalam suatu penelitian disebut populasi, dalam hal ini yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat desa balam merah kecamatan bunut kabupaten pelalawan yang berjumlah 459 kk dan 1311 jiwa

##### **b. Sampel**

Dengan melihat populasi yang terlalu banyak, maka hanya sebagian populasi yang akan dijadikan sampel. Penulis mengambil sampel dengan menggunakan rumus slovin, yaitu :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$\text{jadi, } n = \frac{459}{1 + 459(0,01)}$$

$$n = \frac{459}{1 + 4,59}$$

$$n = \frac{459}{5,59}$$

$$n = 82,11$$

Jadi sampel yang akan diambil adalah 82 orang dari 459 KK yaitu 1311 jiwa. Pada penelitian ini penulis mengambil sampel yaitu dengan menggunakan teknik random sampling yakni teknik penentuan sampel dengan cara mengambil dari semua anggota populasi, dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam anggota populasi (Sugiono: 2007 : 59)

### 3.3 Jenis data dan Sumber data

(Kantor kepala Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan )

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh melalui wawancara, dan penyebaran angket dengan responden tentang pendapatnya atau tanggapannya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan tersebut.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari aparat desa yang berkaitan dengan penelitian ini, data tersebut antara lain: jumlah penduduk, keadaan geografis, tingkat pendidikan, mata pencaharian dan luas wilayah.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipercaya maka penulis dalam pengumpulan data menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu pengamatan yang dilakukan oleh peneliti secara langsung di lokasi penelitian untuk mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penelitian.

2. Questioner (angket)

Yaitu membuat dan mengajukan daftar pertanyaan kepada responder penelitian tentang tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

2. Wawancara (Interview)

Yaitu dengan mengadakan tanya jawab kepada key informan (sumber Informasi) yaitu beberapa aparat desa yang dijadikan sebagai sumber guna memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian ini

### **3.5 Teknik Analisa Data**

Setelah semua data yang dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya data dikelompokkan dan diolah menurut jenisnya, setelah itu dianalisa secara deskriptif, yaitu suatu analisa

yang berusaha memberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan dilapangan dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk table dan dilengkapi dengan uraian-uraian serta keterangan yang mendukung untuk dapat diambil kesimpulan

Data yang diperoleh dari angket akan diamati dengan menggunakan rumus sebagai berikut (anas sudijono, 2007: 43)

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan:

P =Persentase

F :Frekuensi

N : Jumlah responden

Adapun pengukuran terhadap variabel penelitian dan indicator penelitian ini menggunakan lima alternative jawaban yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut (husaini usman : 146)

- |                     |  |
|---------------------|--|
| Sangat setuju       | : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden berada pada interval 81%-100%. |
| Setuju              | : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden berada pada interval 61%-80%.  |
| Ragu                | : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden berada pada interval 41%-61%.  |
| Tidak setuju        | : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden berada pada interval 21%-40%.  |
| Sangat tidak setuju | : Apabila jumlah skor yang diperoleh dari jawaban responden berada pada interval 0%-21%.   |

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **4.1 Keadaan Geografis Desa Balam Merah**

Jarak tempuh antara Desa Balam Merah dengan Kecamatan Bunut 10 Km, sedangkan jarak dengan Ibukota Kabupaten Pelalawan (PKL Kerinci) adalah 50 Km dan jarak tempuh ke Ibukota Provinsi Riau (Pekanbaru) adalah 130 Km. Daerah ini merupakan daerah dataran rendah yang dilalui beberapa anak sungai kecil yang bermuara kesungai Kampar diantaranya: Sungai Tolam, Sungai Kokat, dan Sungai Mampolu. Daerah ini memiliki iklim tropis dengan suhu antara 22 c pada malam hari 29 c pada Siang hari, dan kelembaban berkisar antara 54%-63%.

Desa Balam Merah memakai adat Melayu Petalangan, dan pimpinan adat tertinggi di pegang oleh Batin Bunut. Diangkat oleh empat kepala suku yaitu suku Modang, suku Maneleng, suku Peliang, dan suku Pelabi.

Desa Balam Merah terletak sebelah selatan Kecamatan Bunut, dan bagian Utara Kabupaten Pelalawan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Bagan Lagu
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Angkasa
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Dundangan
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Sialang Kayu Batu

## 4.2 Keadaan Penduduk

Penduduk merupakan komponen yang berada dalam suatu wilayah daerah tertentu dan juga faktor yang dominan dalam suatu pembangunan suatu wilayah, termasuk sumber daya manusia maka pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya pelaksanaan pembangunan bisa memberikan kesejahteraan masyarakat sehingga hasil pembangunan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Dari data yang didapat dari monografi Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan pada tahun 2010, berdasarkan Jenis kelamin penduduk Desa Balam Merah berjumlah 1311 jiwa, untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

**Tabel4.1. Jumlah Penduduk Berdasar Jenis Kelamin**

Jenis kelamin	Jumlah	Persentase(%)
Laki-laki	660	50,34%
Perempuan	651	49,65%
<b>Jumlah</b>	<b>1311</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Kantor Kepala Desa Balam Merah Tahun 2012*

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk di desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan didominasi oleh penduduk yang berjenis kelamin laki-laki(50,34%). Kemudian jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah

**Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur**

No	Kelompok umur	Jumlah	Persentase%
1	0-10 tahun	130	9,91%
2	11 -20 tahun	227	17,31%
3	21-30 tahun	241	18,38%
4	31-40 tahun	501	38,21%
5	41-50 tahun	115	8,77%
6	51 tahun keatas	97	7,39%
<b>Jumlah</b>		<b>1311</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Kantor Kepala Desa Balam Merah 2012*

Dari Tabel 4.2 diatas dapat diketahui mayoritas penduduk Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan pada usia 31-40 tahun berjumlah 501 orang(38,21%) menipakan usia yang produktif bagi manusia dalam melakukan berbagai aktifitas dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, kemudian penduduk yang 51 tahun paling sedikit berjumlah 97 orang(7,39%) merupakan usia yang kurang produktif dalam melakukan aktifitas.

#### 4.3 Mata Pencaharian Penduduk

Mencari nafkah merupakan kebutuhan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.Mata pencaharian masyarakat Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan beranekaragam namun sebagian besar masyarakat petani. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

**Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan**

No	Mata pencaharian	Jumlah	Persentase%
1	Petani	850	64,83%
2	Pedagang	300	22,88%
3	Buruh	130	9,91%
4	PNS	28	2,135%
5	Pensiunan	3	0,225%
<b>Jumlah</b>		<b>1311</b>	<b>1,00%</b>

*Sumber : Kantor Kepala Desa Balam Merah Tahun 2012*

Dari Tabel diatas dapat kita lihat jumlah penduduk dengan pencahariannya. Dimana penduduk dengan mata pencaharian petani lebih banyak yaitu 850 orang atau (64,83%), sedangkan penduduk dengan mata pencaharian paling sedikit adalah pensiunanya berjumlah 3 orang atau (0,22%).

#### 4.4 Pendidikan

Pendidikan di desa balam merah kecamatan bunut kabupaten pelalawan pada umumnya sudah baik, hal ini dapat dilihat dengan sedikitnya penduduk yang buta huruf. Walaupun masih ada dijumpai penduduk tidak tamat SD. Kebanyakan penduduk yang tidak tamat SD berasal dari penduduk yang berusia 50 tahun keatas. Disebabkan pada zaman mereka sulit untuk sekolah karena keterbatasan biaya, fasilitas sekolah juga masih sangat kurang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.4 dibawah ini :

**Tabel 4.4. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	Tidak/ belum sekolah	340	25,93%
2	SD/ sederajat	531	40,50%
3	SLTP/ sederajat	202	15,40%
4	SLTA/ sederajat	201	15,33%
5	Diploma	15	1,14%
6	S 1	22	1,67%
<b>Jumlah</b>		<b>1311</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Kantor Kepala Desa Balam Merah Tahun 2012*

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa masih banyak penduduk yang tamat SD/ sederajat lebih banyak berjumlah 531 atau (40,50%), kemudian penduduk berpendidikan tidak/ belum sekolah berjumlah 340 orang (25,93%), tingkat pendidikan SLTP/ sederajat berjumlah 202 orang (15,40%), tingkat pendidikan SLTA/ sederajat berjumlah 210 orang (15,33%), tingkat pendidikan Diploma berjumlah 15 (1,14%), dan tingkat pendidikan strata 1 (S 1) berjumlah 22 orang (1,67%).

#### **4.5 Agama**



Negara Republik Indonesia menjamin setiap warga negaranya untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, sebagaimana telah disebutkan dalam UUD 1945 pasal 29 ayat 2 menjelaskan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, oleh karena, itu kehidupan beragama di Desa Balam. Merah Kecamatan Bunut Kabupaten pelalawan mayoritas menganut agama Islam. Dalam menjalankan kegiatan keagamaan perlu oleh sarana dan prasarana, salah satunya yaitu tempat peribadatan dan sebagai sumber informasi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 4.5. dibawah ini :

**Tabel 4.5. Jumlah Sarana Ibadah**

No	Sarana ibadah	Jumlah	Persentase(1/0)
1	Masjid	2	66,66%
2	Musholla	1	33,33%
Jumlah		3	

*Sumber: Kantor Kepala Desa Balam Merah 2012*

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa di desa balam merah kecamatan bunut kabupaten pelalawan terdapa sarana ibadah yakni Masjid dan Musholla. Dari tabel tersebut juga terlihat bahwa Masjid sebanyak 2 buah atau (66.66%), sedangkan Mushalla sebanyak 1 buah atau (33.33%).

#### 4.6 Suku Budaya

Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan penduduknya cukup besar yang terdiri dari berbagai suku budaya. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4.6 dibawah ini sebagai berikut:

**Tabel 4.6 Jumlah penduduk Menurut Suku**

No	Nama Suku	Jumlah	Persentase ( % )
----	-----------	--------	------------------

1	Melayu	1209	92,21%
2	Jawa	62	4,72%
3	Batak	25	1,92%
4	Minang	15	1,44%
<b>Jumlah</b>		<b>1311</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Kantor Kepala Desa Balam Merah 2010*

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa penduduk yang tinggal di desa balam merah kecamatan bunut kabupaten pelalawan. Suku melayu merupakan suku yang terbesar jumlah penduduknya dengan jumlah 1209 orang(92,21%) dari jumlah penduduk desa balam merah, suku jawa yang tinggal di desa balam merah berjumlah 62orang(4,72%), kemudian suku batak yang tinggal di desa balam merah berjumlah 25 orang(1,92%), sedangkan suku minang yang tinggal di Desa Balam Merah berjumlah 15orang(1,44%). Masyarakat di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan memakai adat Melayu Petalangan, dan pimpinan adat tertinggi di pegang oleh Batin Bunut. Diangkat oleh empat kepala suku yaitu suku Modang, suku Maneleng, suku Peliang , dan suku Pelabi.

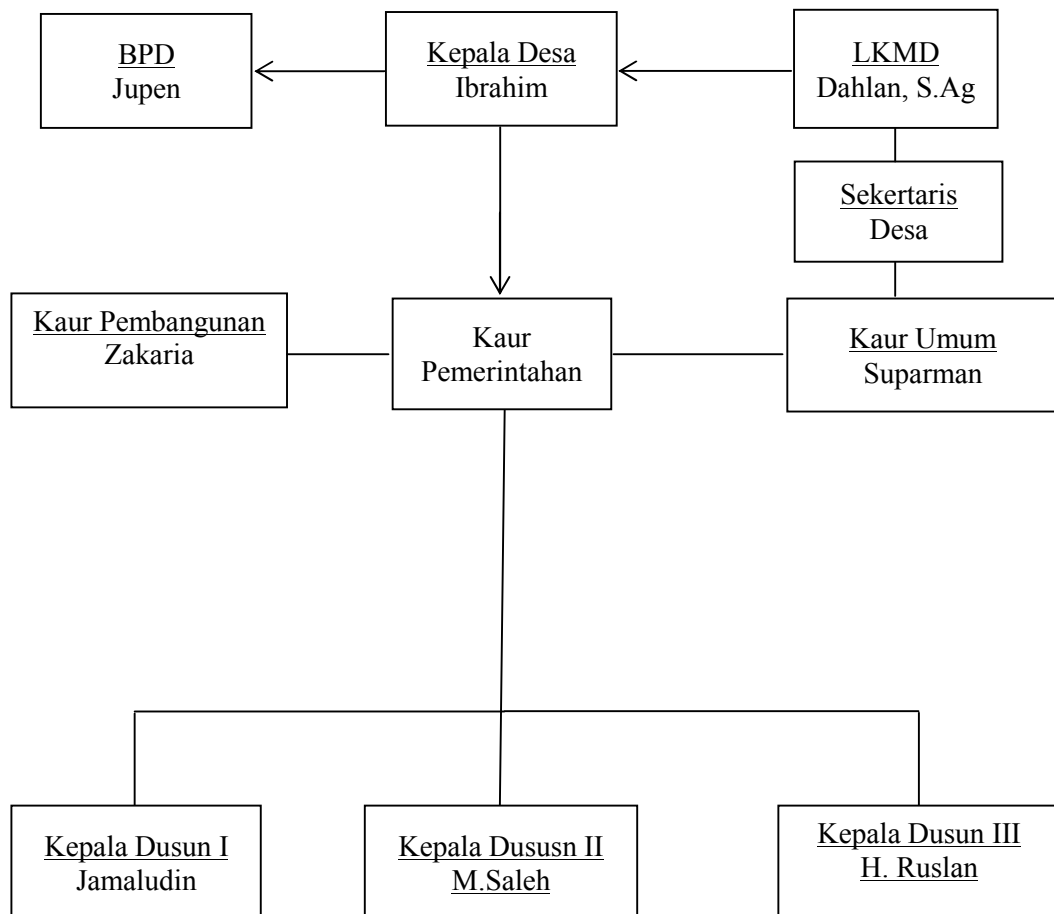
#### **4.7 Pemerintahan**

Pemerintahan adalah organisasi yang melaksanakan pemerintahan dalam suatu daerah baik dalam satu kecamatan dan desa kepadesa bertugas untuk membantu Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam tingkatan desa. Setiap kepala Desa yang ada dibantu oleh beberapa pegawai untuk membatu tugas tugasnya, agar tercipta pelayanan yang lancar dan baik, sebagai abdi masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam bagan struktur organisasi pemerintahan desa Balam Merah dibawah ini

**Gambar. 4.1.**

## Struktur organisasi Pemerintahan Desa Balam Merah Kecamatan

Bunut Kabupaten Pelalawan, 2012



*Sumber Data: Kantor Kepala Desa Balam Merah 2012*

### 1. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas

- a. Kepala desa
- b. Sekretaris desa
- c. Kepala urusan pemerintahan
- d. Kepala urusan pembangunan
- e. Kepala urusan umum
- f. Kepala dusun

- g. Ketua rukun warga(RW)
- h. Ketua rukun tetangga(RT)

## **2. Uraian Tugas dan Fungsi**

### **a. Kepala desa**

Menurut Undang-Undang otonomi daerah nomor 32.tahun 2004 tentang pemerintah desa sebagaimana tentang tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor. 72 tahun 2005 pasal 14 ayat 1 berbunyi kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Kepala desa merupakan orang yang menjalankan roda pemerintahan pada tingkat desa, sebagai perpanjangan Langan pada tingkat kecamatan, kepala desa berhak untuk melaksanakan peraturan daerah, kepala desa menetapkan peraturan kepala desa dan atau keputusan kepala desa. Peraturan pemerintah nomor.72 tahun 2005 pasal 59 ayat 1.

### **b. Sekretaris Desa**

Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur staf pembantu kepala desa Sekretaris desa mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan desa, seperti melayani masyarakat dalam pengurusan administrasi.Sekretaris desa juga sebagai orang kedua dalam menjalankan pembangunan pada tingkat desa.Hal ini sesuai dengan peraturan pemerintah nomor.72 tahun 2005 pasal 12 ayat I dan 2 yang berbunyi pemerintah desa sebagai sebagaimana yang dimaksud, terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.Kemudian perangkat desa yang dimaksud pada ayat I terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Sekretaris

desa mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Memberikan saran dan pendapat. mengendalikan serta mengawasi semua unsur kegiatan sekretaris desa
2. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretaris desa dan keadaan desa
3. Merumuskan program kegiatan kepala desa
4. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan sekretaris desa
5. Melaksanakan urusan Surat menyurat, kesiapan arsip dan laporan
6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasilnya
7. Menyusun RAPE(rancangan anggaran pendapatan) desa
8. Mengadakan kegiatan inventarisasi
9. Mengadakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pertanahan
10. Melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan
11. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa

**c. Kepala Urusan Pemerintahan**

1. Melaksanakan administrasi penduduk desa
2. Melaksanakan dan memberi pelayanan terhadap masyarakat dalam pembuatan kartu tanda penduduk(KTP)
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pertanahan

4. Melaksanakan kegiatan monografi desa
5. Melaksanakan penvelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan kepala desa
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa

**d. Kepala Urusan Pembangunan**

1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan desa.
2. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Melaksanakan data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan.
4. Melaksanakan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan proyek, daftar usulan kegiatan, serta mencatat daftar usulan proyek kegiatan.
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

**e. Kepala urusan umum**

1. Melaksanakan dan menerima, mengendalikan surat-surat masuk dan Surat-Surat keluar serta melaksanakan tata kearsipan.
2. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur desa.
3. Melaksanakan persiapan penyelenggaraan rapat dan penerimaan alas tamu dinas.
4. Melaksanakan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan alat kantor
5. Mencatat inventerisasi kekayaan desa.

**f. Ketua Rukun Warga**

1. Menggerakan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat diwilayahnya
2. Membantu kelancaran tugas-tugas pokok LKMD

**g. Ketua Rukun Tetangga(RT)**

1. Membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah
2. Menjaga keselarasan hidup warga

Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 5.1 Identitas Responden

Dari jumlah sampel 82 orang dan kuiseoner disebarkan sebanyak jumlah sampel yang ada akan tetapi jumlah kuiseoner yang kembali hanya sebanyak 62 jadi data olahan hanya sebanyak angket yang kembali. Untuk lebih mengidentifikasian dari hasil penelitian maka terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai identitas responden, akan dilakukan melalui jenis kelamin, tingkat umur, tingkat pendidikan serta jenis pekerjaan. Untuk lebih lanjutnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

##### 5.1.1 Keadaan responden berdasarkan jenis kelamin

Dalam penelitian ini, jumlah responden dapat dibedakan menurut jenis kelaminnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.1. Keadaan Responden Berdasarkan Jenis Kelamin Penelitian di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan**

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	42	67,74%
2.	Perempuan	20	32,25%
Jumlah		62	100 %

*Sumber: data olahan hasil penelitian, 2012*

Dari tabel V.1 diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar jumlah responden penelitian ini adalah laki-laki yaitu sebanyak 42 orang (67,74%), sedangkan jumlah responden perempuan sebanyak 20 Orang (32,25%). Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa diharapkan akan menjadi lebih baik karena mayoritas responden adalah laki-laki



### 5.1.2 Keadaan responden berdasarkan kelompok umur

Disamping menurut jenis kelamin, jumlah responden juga dapat dilihat menurut tingkat umur yang dimiliki. Karena tingkat umur juga berpengaruh terhadap cara berfikir masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat umur responden dapat dilihat pada tabel V.2 dibawah ini :

**Tabel V.2. Keadaan responden penelitian menurut kelompok umur Didesa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan**

No	Tingkat Umur	Jumlah	Persentase(%)
1.	15-25 tahun	12	19,35
2.	26-36 tahun	18	29,03
3.	37-47 tahun	22	35,48
4.	>55 tahun	10	16,12
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Sumber: Data Olahan Hasil Penelitian, 2012*

Dari tabel V.2 diatas memperlihatkan kelompok umur responden penelitian paling banyak berumur 37-47 tahun berjumlah 22 orang ( 35,48%), kemudian yang paling sedikit berumur > 55 tahun berjumlah 10 orang (16,12%) Dengan demikian dapat diketahui bahwa rata-rata usia responden penelitian pada usia yang sangat produktif untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dalam partisipasi pembangunan desa, yaitu diDesa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.

### 5.1.3 Keadaan Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap pembangunan, terutama dalam pelaksanaan pembangunan desa. Karena bisa dikatakan dengan pendidikan yang didapat maka masyarakat akan lebih mempunyai pengetahuan bagaimana peran mereka terhadap pembangunan. Oleh

karena itu dalam penelitian ini jumlah responden juga dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimilikinya. Lebih jelasnya tertera pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.3. Jumlah tingkat pendidikan responden penelitian diDesa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan,2012**

No	Tingkat pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	SD/ sederajat	24	38,70
2.	SLTP/ sederajat	11	17,74
3.	SLTA/ sederajat	10	16,12
4.	Diploma(d3)/sederajat	9	14,51
5.	Sarjana/ sederajat	8	12,90
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Sumber; Data Olahan Hasil Penelitian,2012*

Dari tabel V.3 bahwa jumlah responden yang hanya bebrbekal pendidikan sd paling banyak yaitu 24 orang (38,70%), sedangkan yang sudah tamat perguruan tinggi hanya 8 orang (12,90%). dengan demikian dapat dikatakan bahwa kualitas pendidikan masyarakat masih sangat rendah.

#### **5.1.4. Keadaan responden berdasarkan jenis pekerjaan**

Jenis pekerjaan merupakan salah satu usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pekerjaan juga erat hubungannya dengan keadaan sosial ekonomi, dimana akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan mempunyai pekerjaan maka akan diharapkan dapat mendukung masyarakat untuk lebih aktif lagi dalam pelaksanaan pembangunan desa. Karena jika masyarakat turut aktif maka pembangunan yang akan dilaksanakan dapat mempunyai manfaat dan lebih bisa digunakan serta dimanfaatkan oleh seluruh komponen masyarakat setempat sesuai dengan tujuan pembangunan itu sendiri yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat. Jenis pekerjaan masyarakat yang dijadikan responden pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel : V.4. Jumlah keadaan jenis pekerjaan responden penelitian di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan**

<b>No</b>	<b>Jenis pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase (%)</b>
1.	Petani	26	41,93
2.	Buruh	14	22,58
3.	Pedagang	6	9,67
4.	PNS	12	19,35
5.	Lain-lain	4	6,45
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Sumber: data olahan hasil penelitian, 2012*

Tabel V.4 diatas menunjukkan bagaimana keadaan jumlah responden dengan jenis pekerjaannya. dapat dilihat paling banyak adalah masyarakat yang bermata pencaharian petani yaitu sebanyak 26 orang (41,93%), dengan demikian jenis pekerjaan sangat berpengaruh terhadap partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.

## **5.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan Tahun 2012**

Pembangunan desa merupakan pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan dan pembinaan masyarakat desa yang dilaksanakan berdasarkan kesepakatan dan keinginan masyarakat desa atas dasar kekuatan dan potensi yang dimiliki desa tersebut. Oleh karena itu pembangunan desa hanya akan terlaksana dengan baik dan tepat sasaran apabila seluruh komponen masyarakat desa terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan masyarakat dalam hal ini adalah dalam hal partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam bentuk partisipasi langsung maupun tidak langsung. Dimana perwujudan yang dapat diberikan dalam bentuk sumbangan dana uang

atau benda yang diperlukan dalam pembangunan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk tidak ikut berpartisipasi selain masalah dana, ada juga masalah tingkat sosial budaya yang sangat berpengaruh terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, sarana dan prasarana juga sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat penyediaan prasarana sosial hal ini tidak lain agar pelaksanaan pembangunan masyarakat dapat mencapai sasaran, selain sarana prasarana tingkat pekerjaan juga mempengaruhi partisipasi tingkat kemajuan pembangunan dapat dilihat dari bagaimana cara masyarakat menghargai seberapa besar arti pembangunan bagi suatu daerah yaitu dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang sangat erat hubungannya dengan partisipasi, sementara pendidikan sangat erat sekali hubungannya dengan tingkat pekerjaan masyarakat, dan yang terakhir yang sangat mempengaruhi partisipasi yaitu ikut sertanya para pelaksana partisipasi dan dijalankan dengan organisasi dan manajemen yang baik.

#### **5.2.1. Ekonomi**

Partisipasi yaitu keikutsertaan seseorang dalam suatu kegiatan keikutsertaan masyarakat secara aktif baik dalam menyumbang dana, fikiran ataupun tenaga. Menyakini bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu kunci keberhasilan dari setiap upaya pembangunan. Dari sini dapat diyakini oleh pemerintah bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan salah satu syarat utama untuk keberhasilan proses pembangunan. Partisipasi dapat dianggap sebagai tolak ukur dalam menilai apakah kegiatan pembangunan desa dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Dari kondisi tersebut, bermunculanlah lembaga-lembaga yang tumbuh di tengah masyarakat yang bukan saja sebagai wujud kepedulian terhadap nasib mereka sendiri. Ternyata lembaga-lembaga atau organisasi itu ada pula yang tumbuh menjadi alat-alat atau sarana-sarana bagi mediasi kepentingan masyarakat, termasuk pula kepada pemerintah. Terkait dengan hal itulah, adalah hal yang wajar saat ini jikalau pemerintah sendiri melihat hal ini dengan bijak serta berbaik sangka. Pemerintah harus pula siap menjadi lebih terbuka, akuntabilitas serta lebih transparan menghadapi iklim yang terjadi di masyarakat saat ini.

Sebagian besar masyarakat Indonesia adalah petani dan buruh. Ironisnya, sejumlah besar petani kita, bekerja dan hidup di atas lahan yang bukan milik mereka sendiri. Mereka yang merasa “memiliki” lahan pun kadangkala tanpa hak kepemilikan yang resmi. Legalisasi serta sertifikasi tanah yang ada baru mencakup sebagian kecil dari lahan yang diolah para petani. Di tengah kondisi itu, pemerintah belum mengupayakan perbaikan maksimal nasib para petani sehingga ekonomi masyarakat sangat mempengaruhi partisipasi pembangunan desa dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.5. Tanggapan Responden Tentang Tingkat Pendapatan Masyarakat yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa**

No	Jawaban alternatif	Jumlah responden	Persentase %
1	Sangat setuju	8	12,90
2	Setuju	22	35,48
3	Ragu-ragu	16	25,80
4	Tidak setuju	8	12,90
5	Sangat tidak setuju	8	12,90
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100 %</b>

*Sumber: Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel diatas 8 orang (12,90%) responden mengatakan sangat setuju jika pendapatan sangat mempengaruhi partisipasi, 22 orang (35,48%) responden menjawab setuju jika pendapatan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan alasan mereka kondisi di desa tidak tersentuh pembangunan secara utuh, infrastruktur dasar tidak terpenuhi, aktivitas ekonomi sangat rendah, peluang usaha juga rendah, sebagian besar baru terpenuhi untuk sekolah dasar saja, Kondisi ini menyebabkan tidak ada pilihan lain bagi masyarakat desa untuk merubah nasibnya sehingga sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, 16 orang (25,80%) responden mengatakan ragu-ragu, 8 orang (12,90%) responden mengatakan tidak setuju jika faktor pendapatan mempengaruhi partisipasi pembangunan desa dan 8 orang (12,90%) mengatakan sangat tidak setuju karena alasan mereka pendapatan itu tergantung pada usaha masing-masing masyarakat jika masyarakat mau berusaha sungguh-sungguh maka pendapatan mereka akan meningkat.

Jadi dapat disimpulkan tingkat pendapatan yang diterima oleh masyarakat desa akan sangat mempengaruhi terhadap pembangunan yang dilaksanakan. Jika pendapatan masyarakat tinggi maka akan dapat membantu tingkat perekonomian serta dapat mempertinggi tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa jenis pekerjaan juga mempengaruhi partisipasi pembangunan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.6.: Tanggapan Responden Tentang Jenis Pekerjaan Yang Dimiliki Oleh Masyarakat Desa**

No	Jawaban Alternatif	Jumlah Responden	Persentase %
1	Sangat setuju	7	11,29
2	Setuju	25	40,32
3	Ragu-ragu	20	32,25
4	Tidak setuju	5	8,06
5	Sangat tidak setuju	5	8,06
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100</b>

*Sumber :Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel diatas 7 orang (11,29%) responden mengatakan sangat setuju, 25 orang (40,32%) responden menjawab setuju. alasan mereka mengatakan setuju karena mayoritas pekerjaan yang dimiliki masyarakat adalah dibidang perkebunan seperti perkebunan karet,dan sawit sebagian kecil menanam padi. Ini membuktikan bahwa pemenuhan kebutuhan masyarakat masih sangat kurang, yang mana lebih besar pengeluaran daripada pendapatan sehingga partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan terhambat, dampaknya pembangunan desa tidak akan berjalan lancar. Dan 5 orang (8,06%) mengatakan sangat tidak setuju karena menurut masyarakat setempat, kebersamaan mereka dalam mengatasi masalah selalu mereka tanamkan dilingkungannya, karena tidak semua pekerjaan dapat mereka selesaikan sendiri sehingga menurut mereka pekerjaan tidak mempengaruhi partisipasi pembangunan.Tingkat kemajuan pembangunan dapat dilihat dari bagaimana cara masyarakat menghargai seberapa besar arti pembangunan bagi suatu daerah yaitu dengan memanfaatkan sumberdaya manusia yang erat sekali hubungannya dengan pekerjaan, sedangkan angkatan kerja merupakan bagian dari jumlah penduduk yang mempunyai pekerjaan atau yang sedang mencari pekerjaan. Dengan pekerjaan yang dimiliki maka masyarakat akan mempunyai penghasilan dan dengan penghasilan tersebut diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam pembangunan desa tingkat pendidikan juga mempengaruhi partisipasi pembangunan desa dapat dilihat pada tabel dibawah :

**TabelV.7: Tanggapan Responden Tentang tingkat Pendidikan Masyarakat Berpengaruh Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa**

No	Jawaban Alternatif	Jumlah Responden	Persentase %
1	Sangat setuju	12	19,35
2	Setuju	24	38,70
3	Ragu-ragu	10	16,12
4	Tidak setuju	10	16,12
5	Sangat tidak setuju	6	9,67
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel diatas 12 orang (19,35%) responden mengatakan sangat setuju, 24 orang (38,70%) responden menjawab setuju karena semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi pulalah tingkat kesadaran untuk melakukan upaya pembangunan, sebaliknya tingkat pendidikan seseorang berakibat pada rendahnya kesadaran untuk membangun, faktor pendidikan memegang peran penting dalam era pembangunan sekarang ini, karena hal ini adalah agar masyarakat benar-benar mengetahui akan arti pentingnya dari pembangunan yang akan dilaksanakan. dan 6 orang (9,67%) mengatakan sangat tidak setuju masyarakat berpendapat berpendidikan atau tidaknya masyarakat desa tidak mempengaruhi partisipasi pembangunan walaupun mereka tidak berpendidikan mereka tetap bisa berpartisipasi dan pembangunan juga bisa berjalan dengan baik. Pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat suatu daerah mulai dari jenjang pendidikan yang terendah hingga kepada jenjang yang lebih tinggi dapat membantu tingkat perekonomian serta memperluas pengetahuan masyarakat dan mempertinggi rasionalitas pemikiran mereka dan memungkinkan masyarakat untuk dapat bertindak lebih lanjut dalam mengembangkan suatu keputusan yang lebih baik, jadi dapat disimpulkan faktor pendidikan sangat mempengaruhi partisipasi.



**Tabel V.8. : Rekapitulasi tanggapan Responden Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Dibidang Ekonomi**

No	Sub indikator	Kategori jawaban										N	%
		SS		S		R		TS		STS			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Tingkat pendapatan masyarakat desa	8	12,90	22	35,48	16	25,80	8	12,90	8	12,90	62	100
2	Tentang jenis pekerjaan yang dimiliki masyarakat desa	7	11,29	25	40,32	20	32,25	5	8,06	5	8,06	62	100
3	Jenjang pendidikan yang pernah diikuti	1 2	19,35	71	38,17	46	24,73	23	12,36	6	9,67	62	100
Jumlah		2 7	24,73	71	38,17	46	24,73	23	12,36	19	10,21	186	100

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat diketahui bahwa faktor ekonomi dapat mempengaruhi partisipasi dalam pembangunan desa hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi jawaban responden yang mengatakan setuju (38,17%), dan yang mengatakan tidak setuju (12,36%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat perekonomian sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

Menurut Bapak Ibrahim selaku kepala Desa Balam Merah (wawancara : Agustus 2012) beliau mengatakan upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat salah satunya dengan cara memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam arah pembangunan desa agar masyarakat kecil yang tidak tahu apa-apa mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terlibat, dimana tidak semuanya pembangunan dilaksanakan oleh pemerintah saja tetapi juga memerlukan dukungan dari masyarakat, karena tidak semua bisa dilakukan oleh pihak pemerintah yang juga memiliki keterbatasan.

### 5.2.2. Sosial Budaya

Karya sastra dan kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat ternyata kadangkala mampu membuat banyak orang terpengaruh, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pengaruh ini, baik sebatas visi dan pandangan hidup atau malah pada perilaku keseharian. Dengan begitu kesan yang mungkin ditimbulkan oleh sebuah produk kesenian haruslah mampu terkontrol. Artinya, seni dan produk berkesian secara ideal seyogianya berada dalam koridor tatanan normatif yang mampu menjembatani kebebasan berekspresi dan etika yang berlaku di tengah masyarakat. Ini haruslah dilakukan, mengingat Indonesia adalah negara yang secara nyata menjadikan dasar-dasar kehidupan masyarakatnya berada di atas landasan moral dan spiritual yang baik. Jika tidak terjadi keseimbangan seperti itu, maka dikhawatirkan akan terjadi polemik berkepanjangan tanpa penyelesaian. Ini terjadi sebagaimana pada beberapa waktu yang lalu, yang dimungkinkan karena berbedanya cara pandang terhadap seni dan produk kesenian yang ada di tengah masyarakat. Komposisi umur adalah susunan orang-orang yang tinggal dalam suatu daerah atau wilayah tertentu yang dibedakan menurut tingkat umurnya apabila umur seseorang cukup matang maka ia akan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dengan baik karena kematangan umur akan bisa mengambil keputusan sesuai dengan yang telah direncanakan.

**Tabel V.9: Tanggapan Responden Tentang Tingkat Kematangan Umur Masyarakat Desa**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase %
1	Sangat Setuju	8	12,90
2	Setuju	22	35,48
3	Ragu-Ragu	16	25,80
4	Tidak Setuju	8	12,90
5	Sangat Tidak Setuju	8	12,90
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Tabel V.8: Yang mengatakan sangat setuju 8 orang (12,90%), yang mengatakan setuju 22 orang (35,48%) jika umur seseorang yang ikut berpartisipasi telah matang maka keputusan yang diambil akan terselesaikan secara lebih sempurna sehingga banyaknya masyarakat mengatakan setuju bahwa tingkat kematangan umur sangat mempengaruhi partisipasi, yang mengatakan sangat tidak setuju 8 orang (12,90%) dan alasan mereka yang mengatakan sangat tidak setuju jika tingkat kematangan umur sangat mempengaruhi partisipasi adalah mereka mengatakan walaupun umur seseorang itu belum matang, belum matang disini seperti anak-anak, mereka juga bisa ikut berpartisipasi. apabila umur seseorang cukup matang maka ia akan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan dengan baik karena kematangan umur akan bisa mengambil keputusan sesuai dengan yang telah direncanakan.

**Tabel V.10 : Tanggapan Responden Tentang Sistem Sosial Atau Kebudayaan Yang Mempunyai Arti Dalam Masyarakat**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase %
1	Sangat Setuju	9	14,51
2	Setuju	21	33,87
3	Ragu-Ragu	15	24,19
4	Tidak Setuju	10	16,12
5	Sangat Tidak Setuju	7	11,29
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Tabel V.9: yang mengatakan sangat setuju 9 orang (14,51%), yang mengatakan setuju 21 orang (33,87%) karena budaya merupakan nilai yang dipegang oleh masyarakat, lahir dari sesuatu yang dianggap baik dan kemudian dilestarikan menjadi kebiasaan-kebiasaan dalam hidup. Pada umumnya budaya yang dipegang oleh spesifik berkembang untuk kepentingan sosial dan menjaga tatanan masyarakat agar tetap dalam kondisi baik, maka budaya tersebut akan

dapat bertahan lama, apalagi jika budaya tersebut melahirkan karakter manusia yang senang melahirkan kerjasama, faktor kebudayaan merupakan faktor kekuatan untuk terlaksananya pembangunan secara cepat dan yang mengatakan sangat tidak setuju 7 orang (11,29%) karena Etnik atau budaya sebagaimana telah ketahui bersama, di tengah masyarakat kita telah tumbuh beranekaragam kesenian dan budaya yang merupakan warisan dari para orang tua serta nenek moyang kita. Hal ini, tentu saja wujud kekayaan yang tak ternilai harganya bagi bangsa. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu sehingga mereka mengatakan budaya tidak mempengaruhi partisipasi pembangunan desa. kesenian dan budaya ini akan menjadi semakin bermanfaat besar ketika kita terus menggali, mengembangkan serta memberikan inovasi-inovasi kreatif. Sehingga pada akhirnya usaha-usaha ini akan menjadikan masyarakat semakin menghargai kesenian dan budaya kita.

**TabelV.11: Tanggapan Responden Tentang Sistem Kepercayaan (agama) Masyarakat Desa**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase %
1	Sangat Setuju	15	24,19
2	Setuju	19	30,64
3	Ragu-Ragu	22	35,48
4	Tidak Setuju	4	6,45
5	Sangat Tidak Setuju	3	4,83
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100 %</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Tabel V.10: yang mengatakan sangat setuju 15 orang (24,19%), yang mengatakan setuju 19 orang (30,64%) karena dengan diadakannya pengajian dilingkungan tempat tinggal mereka maka motivasi pembangunan dalam bidang akan terbangun secara baik dan maksimal, dan yang mengatakan sangat tidak setuju 3 orang (4,83%) mereka mengatakan dengan diadakannya perkumpulan ibuk-ibuk itu bukanlah sifat untuk membangun tapi hanya membuat para ibuk-

ibuk itu menceritakan keburukan orang lain.tentu saja pemerintah tidak bisa berdiri sendiri, diperlukan peran masyarakat yang lebih luas. Pendidikan agama yang selama ini berjalan tentu saja tidak akan memadai untuk sekedar memahami orang saja yang perlu dipahami bersama, diantara karakter penting sistem pendidikan yang ada adalah penguatan pada sisi pendidikan kepribadian atau disebut juga akhlak. Masyarakat juga diarahkan agar mampu untuk memahami dan menguasai berbagai bidang keilmuan dan ketrampilan, berkonsekuensi pada tidak mungkinnya semua itu bisa dipenuhi oleh penyelenggara pendidikan agama.Maka diperlukanlah aktifitas yang terpadu dan terencana secara baik.Hal ini tentu sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

**Tabel V.12. Rekapitulasi tanggapan Responden Menngeni Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Dalam Bidang Sosial Budaya**

Pang Mempengaruhi Partisipasi Dalam Bidang Sosial Budaya													
No	Sub Indikator	Kategori jawaban										N	%
		SS		S		R		TS		STS			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Tingkat umur masyarakat desa yang cukup matang, sehingga dapat ikut berpartisipasi	8	12,90	22	35,48	16	25,80	8	12,90	8	12,90	62	100
2	Etnik atau budaya yang mempunyai arti dalam bermasyarakat	9	14,51	21	33,87	15	24,19	10	16,12	7	11,29	62	100
3	Sistem kepercayaan yang dianut oleh masyarakat desa	15	17,20	19	30,64	22	35,48	4	6,45	3	4,83	62	100
Jumlah		32	17,20	62	33,33	53	28,49	22	11,84	18	9,67	186	100

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Jadi,dapat disimpulkan bahwa sosial budaya sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa,dapat dilihat dari tabel diatas, yang mengatakan setuju (33,33%) dan yang mengatakan tidak setuju (11,84%).

### 5.2.3. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh lembaga pemerintahan desa merupakan alat pendukung didalam merealisasikan tujuan yang ada. Sebab dengan minimnya sarana dan prasarana yang dimiliki akan sangat menghambat dalam menghasilkan produktivitas yang tinggi, untuk mengurus pembangunan desa sangat dibutuhkan alat komunikasi yang lancar, dan juga alat-alat yang masih kurang seperti komputer sebagai sarana dan prasarana yang sangat vital dalam pengelolaan pembangunan desa dan sarana prasarana untuk memotivasi masyarakat seperti sarana olah raga. Dapat penulis jelaskan beberapa sarana dan prasarana Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan pada tabel berikut ini :

**Tabel V.13 : Sarana dan prasarana yang ada dikantor Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan**

No	Jenis sarana dan prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Alat komunikasi	-	-
2	Komputer	1	Baik
3	Mesin tik	-	-
4	Meja kerja	5	Baik
5	Kursi	8	Baik
6	Lapangan volly	1	Baik
7	Lapangan takraw	-	-
8	Buku petunjuk pelayanan	2	Baik
9	Papan pengumumam	1	Baik
10	Ruang tunggu	1	Baik
11	Kendaraan dinas roda dua	-	-
12	Kendaraan dinas roda empat	-	-
13	Ruang kerja	4	Baik

*Sumber : Kantor Desa Balam Merah 2012*

Dari tabel diatas dapat dikemukakan bahwa sarana dan prasarana kerja desa tersedia dalam kondisi baik, akan tetapi jumlahnya masih sangat sedikit khususnya peralatan dan perlengkapan kantor untuk melihat tanggapan responden

mengenai sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan pembangunan didesa balam merah kecamatan bunut kabupaten pelalawan dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel V.14 : Tanggapan Responden Tentang Sarana Olahraga Yang Tersedia Didesa Balam Merah**

NO	Alternatif Jawaban	Jumlah responden	Persentase %
1	Sangat Setuju	10	16,12
2	Setuju	19	30,64
3	Ragu-Ragu	17	27,41
4	Tidak Setuju	8	12,90
5	Sangat Tidak Setuju	8	12,90
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Hasil : Penelitian 2012*

Tabel V.13: yang mengatakan sangat setuju 10 orang (12,19%), yang mengatakan setuju 19 orang (30,64%) mereka mengatakan apabila prasarana olahraga seperti lapangan volli, takraw dan yang lainnya tersedia maka masyarakat akan semangat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan yang mengatakan sangat tidak setuju 8 orang (12,90%) alasan mereka walaupun tidak adanya prasarana olahraga masyarakat juga bisa memotivasi dirinya sendiri yaitu dengan cara membuat perkumpulan masyarakat sehingga bisa membangun prasarana tersebut. apabila prasarana olah raga tersedia maka akan menciptakan masyarakat yang sehat jasmani dan rohani sehingga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan berjalan dengan baik.

**Tabel V.15 : Tanggapan Responden Tentang Sarana Transportasi Yang Tersedia**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase %
1	Sangat Setuju	7	11,29
2	Setuju	25	40,32
3	Ragu-Ragu	20	32,25
4	Tidak Setuju	5	8,06
5	Sangat Tidak Setuju	5	8,06
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Tabel V.14 :yang mengatakan sangat setuju 7 orang (11,29%), yang mengatakan setuju 25 orang (40,32%) dengan tidak adanya sarana transportasi yang tersedia dikantor desa sarana transportasi disini adalah kendaraan dinas baik itu kendaraan dinas roda dua maupun roda empat sehingga urusan pembangunan hanya mengandalkan kendaraan yang dimiliki oleh masing-masing masyarakat sehingga sangat mempengaruhi pembangunan desa, dan yang mengatakan sangat tidak setuju 5 orang (8,06%) jika transportasi mempengaruhi partisipasi alasan mereka jika didesa tidak tersedianya transportasi mengapa masyarakat tidak mencarinya sendiri bukankah itu juga kebutuhan mereka. kelancaran transportasi dapat memperlancar sarana perekonomian masyarakat jika keadaan transportasi dalam keadaan baik. Maka masyarakat akan selalu ikut berpartisipasi

**Tabel V.16 : Tanggapan Responden Tentang Sarana Yang Ada Dikantor Desa**

No	Alternatif Jawaban	Jumlah Responden	Persentase %
1	Sangat Setuju	11	17,74
2	Setuju	30	48,38
3	Ragu-Ragu	10	16,12
4	Tidak Setuju	6	9,67
5	Sangat Tidak Setuju	5	8,06
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Tabel V.15: yang mengatakan sangat setuju 11 orang (17,74%), yang mengatakan setuju 30 orang (48,38%) Apabila sarana kantor memadai maka masalah yang ada akan terselesaikan dengan cepat dan lancar karena masyarakat akan melihat kerja para pemerintah yang ada dikantor desa tersebut, jika peralatannya saja tidak memadai bagaimana dengan pekerjaan para pelaksana tersebut, sehingga membuat enggan masyarakat untuk ikut berpartisipasi, yang mengatakan ragu-ragu 10 Orang (9,67%), yang mengatakan tidak setuju 6 orang



(9,67%), yang mengatakan sangat tidak setuju 5 orang (8,06%) alasan yang mengatakan sangat tidak setuju adalah karena menurut mereka sarana yang ada dikantor desa balam merah sudah mendukung program-program yang ada.

**Tabel V.17 : Rekapitulasi tanggapan Responden Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Dalam Pembangunan Desa Dalam Bidang Sarana Dan Prasarana**

No	Sub Indikator	Kategori jawaban										N	%
		SS		S		R		TS		STS			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Sarana olah raga yang lengkap akan menciptakan masyarakat yang sehat	10	16,12	19	30,64	17	27,41	8	12,90	8	12,90	62	100
2	Sarana transportasi dalam kepengurusan pembangunan desa	7	11,29	25	40,32	20	33,25	5	8,06	5	8,06	62	100
3	Sarana yang ada dikantor desa yang tidak memadai	11	17,74	30	48,38	10	16,12	6	9,67	5	8,06	62	100
Jumlah		28	15,05	74	39,78	47	25,26	19	10,21	18	9,67	186	100

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Jadi, dapat disimpulkan bahwa sosial budaya sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dapat dilihat dari tabel diatas, yang mengatakan setuju (39,78%) dan yang mengatakan tidak setuju (9,67%).

Menurut Bapak Zakaria selaku Kaur Pembangunan pada (Agustus 2012) beliau mengatakan program yang dilakukan agar keputusan yang diambil secara bersama berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, beliau menjelaskan pembangunan wilayah pedesaan mempunyai prinsip dasar pembangunan dari masyarakat untuk masyarakat dan oleh masyarakat. Hal ini dapat tercapai bila proses Pembangunan berakar pada kemampuan sumber daya alamnya dan kreativitas seluruh pelaku pembangunan pemerintah harus mengupayakan bentuk-

bentuk partisipasi yang efektif dan produktif. Pemerintah pusat dalam hal ini adalah fasilitator untuk pencapaian tersebut. Dengan demikian proses pelaksanaan pengembangan wilayah dan pembangunan desa diharapkan akan mencapai hasil secara efektif dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan ditangani melalui program penataan ruang. Program kebijaksanaan penataan ruang disusun dengan memperhatikan Pendekatan yang mengedepankan peran masyarakat dalam pembangunan.

#### **5.2.4. Pendidikan**

Pendidikan adalah permasalahan besar yang menyangkut nasib dan masa depan bangsa dan negara. Karena itu, tuntutan reformasi politik, ekonomi, sosial, hak azasi manusia, sistem pemerintahan dan agraria tidak akan membuahkan hasil yang baik tanpa reformasi sistem pendidikan. Krisis multidimensi yang melanda negara dan bangsa Indonesia dewasa ini, tidak hanya disebabkan oleh krisis ekonomi, sosial dan politik, melainkan juga oleh krisis pada sistem pendidikan nasional.

Pola partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan seharusnya memang bukan pola yang bersifat yang mengandung nuansa kurang menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya. Akan tetapi yang relatif lebih sesuai dengan masyarakat lapisan bawah terutama yang tinggal di desa adalah pola pemberdayaan yang sifat di dalamnya ada nuansa penghargaan dan pengakuan bahwa masyarakat lapisan bawah memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu

melakukan usaha-usaha pendidikan dengan prinsip swadaya dan kebersamaan. Bagaimana peran partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan formal dan nonformal untuk melahirkan SDM yang berkualitas tentu saja menjadi pekerjaan rumah semua pihak.

**Tabel V.18 : Tanggapan Responden Tentang Masalah Kurangnya Minat Masyarakat Dalam Menyekolahkan Anak Mereka, Kebanyakan Masyarakat Hanya Tamat Sekolah Dasar**

No	Jawaban Alternative	Jumlah Responden	Persentase %
1	Sangat setuju	9	14,51
2	Setuju	21	33,87
3	Ragu-ragu	15	24,19
4	Tidak setuju	10	16,12
5	Sangat tidak setuju	7	11,29
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel V.17 masyarakat yang mengatakan sangat setuju 9 orang (14,51%), yang mengatakan setuju 21 orang (33,87%) Dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, pendidikan memiliki peran yang sangat penting didalam pembangunan desa apabila pendidikan yang ada dimasyarakat setempat cukup tinggi maka masyarakat akan semangat untuk berpartisipasi, sehingga terciptanya pembangunan desa yang maksimal, disini terlihat kurangnya minat masyarakat desa untuk menyekolahkan anak mereka, kebanyakan masyarakat hanya tamat Sekolah dasar ini menunjukkan bahwa pendidikan masih sangat kurang didesa Balam Merah yang berdampak terhadap pembangunan desa karena mereka berpendapat pendidikan selalu mempersulit mereka dalam menjalankan aktifitas mereka karena banyak aturan yang harus dijalani. dan yang mengatakan sangat tidak setuju 7 orang (11,29%) mereka mengatakan tidak semua orang yang berpendidikan yang bisa menjalankan pembangunan orang yang tidak sekolah pun bisa berpartisipasi dalam pembangunan walaupun mereka mengakui hasilnya tidak akan sama.

**Tabel V.19 : Tanggapan Responden Tentang Masalah Kurangnya Kualitas Pendidikan**

No	Jawaban Alternative	Jumlah Responden	Persentase %
1	Sangat setuju	10	16,12
2	Setuju	19	30,64
3	Ragu-ragu	17	27,41
4	Tidak setuju	8	12,90
5	Sangat tidak setuju	8	12,90
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel V.18 masyarakat yang mengatakan sangat setuju 10 orang (16,12%), yang mengatakan setuju 19 orang (30,64%) Kurangnya kualitas pendidikan, jika seseorang itu berpendidikan maka dia akan mempunyai kesadaran untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan desa, karena pengetahuan orang yang berpendidikan jauh lebih luas jika dibandingkan dengan orang yang kurang dalam pendidikannya, yang mengatakan ragu-ragu 17 orang (27,41%), 8 orang (12,90%) mengatakan tidak setuju dan yang mengatakan sangat tidak setuju 8 orang (12,90%) karena mereka mengatakan sudah banyaknya masyarakat yang sudah bersekolah bahkan sudah banyak yang sudah sarjana walaupun kebanyakan yang sudah sarjana menjadi pengangguran.

**Tabel V.20: Tanggapan Responden Tentang Tingkat Pendidikan Masyarakat Setempat Yang Rendah**

No	Jawaban Alternative	Jumlah Responden	Persentase %
1	Sangat setuju	12	19,35
2	Setuju	24	38,70
3	Ragu-ragu	10	16,12
4	Tidak setuju	10	16,12
5	Sangat tidak setuju	6	9,67
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel V.19 masyarakat yang mengatakan sangat setuju tidak ada, yang mengatakan setuju 12 orang (19,35%) Tingkat pendidikan di Desa Balam Merah sangat rendah kebanyakan masyarakatnya hanya menempuh sekolah dasar, jadi masyarakat beranggapan partisipasi pembangunan desa adalah urusan pemerintah saja, mereka lebih mementingkan urusan rumah tangga mereka sendiri. yang mengatakan ragu-ragu 10 orang (16,12%) 10 orang (16,12%) mengatakan tidak setuju dan yang mengatakan sangat tidak setuju tidak ada.

**Tabel V.21 : Rekapitulasi tanggapan Responden Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Dalam Pembangunan Desa Dalam Bidang Pendidikan**

No	Sub Indikator	Kategori jawaban										N	%
		SS		S		R		TS		STS			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Kurangnya minat masyarakat untuk menyekolahkan anak mereka	9	14,51	21	33,87	15	24,19	10	16,12	7	11,29	62	100
2	Kurangnya kualitas pendidikan	10	16,12	19	30,64	17	27,41	8	12,90	8	12,90	62	100
3	Jika tingkat pendidikan masyarakat tinggi maka masyarakat akan terlibat dalam partisipasi pembangunan	12	19,35	24	38,70	10	16,12	10	16,12	6	9,67	62	100
Jumlah		31	16,66	64	34,40	42	22,58	28	15,05	21	11,29	186	100

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pendidikan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dapat dilihat dari tabel diatas, yang mengatakan setuju (34,40%) dan yang mengatakan tidak setuju (11,29%).

Menurut Ibu Yusnidar selaku Bendahara Desa (wawancara, Agustus 2012) beliau mengatakan program-program yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah, Pada hakikatnya

pemberdayaan diartikan sebagai proses belajar mengajar yang dilakukan secara terencana untuk mengembangkan potensi yang ada dalam diri manusia sehingga mampu melakukan transformasi sosial secara umum, masyarakat desa memiliki sumber daya manusia yang sangat terbatas. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat pendidikan di pedesaan. Oleh karena itu aspek yang penting untuk diperhatikan untuk memberdayakan manusia menuju pembangunan adalah pendidikan karena dengan pendidikan kita tidak hanya mempunyai bekal pengetahuan tetapi juga memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan pembangunan masyarakat. Dengan adanya pendidikan, masyarakat bisa berpikir kreatif dan mampu mengikuti perubahan seperti penggunaan inovasi baru, penerapan teknologi, dan pola pikir yang berorientasi pada pembangunan. Masyarakat yang tidak mampu berubah untuk mengikuti perkembangan zaman akan semakin tertinggal. Dalam keadaan seperti ini, struktur ekonomi masyarakat pedesaan akan tetap berada dalam ambang kemiskinan.

#### **5.2.5. Administrator Atau Pelaksana Partisipasi (pemerintah dan masyarakat)**

Demokrasi tidak cukup hanya difahami sebagai pemerintahan dari, oleh dan untuk rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga perwakilan. Dalam perkembangannya muncul demokrasi partisipatoris yang dapat dimaknai sebagai kekuasaan pemerintahan itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat dan bersama rakyat. Konsekuensinya adalah bahwa lembaga perwakilan hanyalah salah satu pilar demokrasi dan karena itu perlu membuka adanya ruang publik bagi masyarakat luas agar dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan publik.

**Tabel V.22 : Tanggapan Responden Tentang Ikut Andilnya Para Pelaksana Dalam Partisipasi Pembangunan Desa Dalam Bentuk Gotong-Royong**

No	Jawaban Alternatif	Jumlah Responden	Persentase %
1	Sangat setuju	9	14,51
2	Setuju	21	33,87
3	Ragu-ragu	15	24,19
4	Tidak setuju	10	16,12
5	Sangat tidak setuju	7	11,29
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel V.21 masyarakat yang mengatakan sangat setuju 9 orang (14,51%), yang mengatakan setuju 21 orang (33,87%) pelaksana yang baik adalah ikut andil dalam partisipasi pembangunan desa seperti ikut gotong-royong dalam segala hal tidak hanya memotivasi masyarakat saja, jika masyarakat termotivasi maka partisipasi pembangunan akan terlaksana seperti yang telah direncanakan, yang mengatakan ragu-ragu 15 orang (24,19%), 7 orang (11,29%) dan yang mengatakan sangat tidak setuju tidak ada sebab semua masyarakat setuju apabila para motivator pembangunan ikut andil dalam bergotong-royong dalam berpartisipasi.

**Tabel V.23 : Tanggapan Responden Tentang Ikut Andilnya Para Pelaksana Dalam Partisipasi Pembangunan Desa Dalam Bentuk Bantuan Dana**

No	Jawaban alternatif	Jumlah responden	Persentase %
1	Sangat setuju	7	11,29
2	Setuju	25	40,32
3	Ragu-ragu	20	32,25
4	Tidak setuju	5	8,06
5	Sangat tidak setuju	5	8,06
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel V.22 masyarakat yang mengatakan sangat setuju 7 orang (11,29%), yang mengatakan setuju 25 orang (40,32%) masyarakat sangat setuju jika pemerintah ikut menyumbang dana dalam pembangunan desa, mereka menginginkan pemerintah tidak hanya mengunjungi desa saja karena yang diperlukan itu tidak hanya kunjungan tapi yang diperlukan adalah pemenuhan keuangan yang terpenuhi untuk membangun desa, yang mengatakan ragu-ragu 20 orang (32,25%), 5 orang (8,06%) mengatakan tidak setuju dan yang mengatakan sangat tidak setuju 5 orang (8,06%). Jadi dapat disimpulkan semua masyarakat setuju jika Tidak hanya bantuan gotong-royong saja yang dibantu tapi bantuan dana sama pentingnya dalam pembangunan.

**Tabel V.24 : Tanggapan Responden Tentang Ikut Andilnya Para Pelaksana Dalam Partisipasi Pembangunan Desa Dalam Memberikan Ide-Ide Yang Kreatif**

No	Jawaban alternatif	Jumlah responden	Persentase %
1	Sangat setuju	9	14,51
2	Setuju	21	33,87
3	Ragu-ragu	15	24,19
4	Tidak setuju	10	16,12
5	Sangat tidak setuju	7	11,29
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel V.23 masyarakat yang mengatakan sangat setuju 9 orang (14,51%), yang mengatakan setuju 21 orang (33,87%) pemerintah jangan hanya memberikan dana saja setelah memberikan dana lepas tangan begitu saja tapi masyarakat juga memerlukan ide-ide atau masukan-masukan dari pemerintah, karena kerjasama antara masyarakat dengan pemerintah sangat diperlukan dalam pembangunan setelah adanya kerjasama barulah tercipta partisipasi pembangunan yang maksimal, dan yang mengatakan sangat tidak setuju tidak ada. Karena semua



masyarakat setuju Perlunya masukan atau ide-ide kreatif masalah pembangunan desa baik dari masyarakat setempat atau pemerintah desa agar diketahui kemajuan desa yang seperti apa yang diinginkan oleh semua pihak.

**Tabel V.25 : Rekapitulasi tanggapan Responden Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Apabila Dilihat Dari Administrator Pembangunan Atau Pelaksana Pembangunan**

No	Sub Indikator	Kategori jawaban										N	%
		SS		S		R		TS		STS			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Ikut andilnya para pelaksana dalam partisipasi pembangunan desa dalam bentuk gotong-royong	9	14,51	21	33,87	15	24,19	10	16,12	7	11,29	62	100
2	Ikut andilnya para pelaksana dalam partisipasi pembangunan desa dalam bentuk bantuan dana	7	11,29	25	40,32	20	32,25	5	8,06	5	8,06	62	100
3	Ikut andilnya para pelaksana dalam partisipasi pembangunan desa dalam memberikan ide-ide yang kreatif	9	14,51	21	33,87	15	24,19	10	16,12	7	11,29	62	100
Jumlah		25	13,44	67	36,02	50	26,88	25	13,44	19	10,21	186	100

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Jadi, dapat disimpulkan jika para administrator atau pelaksana partisipasi pembangunan tidak ikut andil dalam memberikan bantuan gotong-royong, bantuan dana dan memberikan masukan atau ide-ide kreatif maka akan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, dapat dilihat dari tabel diatas, yang mengatakan setuju (36,02%) dan yang mengatakan tidak setuju (13,44%).

Menurut Bapak Jupen sebagai ketua BPD (wawancara agustus 2012), program-program yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa beliau mengatakan Berdasarkan mekanisme perundang undangan yang ada, seharusnya desa memiliki inisiatif sendiri untuk pembangunan desanya maka program yang dilakukan seharusnya pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh desa kepada pemerintah, misalnya untuk pembangunan infrastruktur fisik, pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Dengan demikian, desa dimungkinkan untuk mengajukan pembiayaan ke pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, misalnya untuk membangun sekolah, pasar desa, listrik, air, dan sebagainya, dan bekerjasama dengan pihak ketiga, misalnya terkait dengan kondisi tanah atau lahan yang tandus dan tidak bisa dikembangkan. Hingga, semua pengajuan program pembangunan desa, dan tata ruang desa.

Berdasarkan perundangan hal tersebut dapat dilakukan oleh desa, namun sejauh ini berbagai program pembangunan desa selalu ditentukan oleh pemerintah, desa hanya melaksanakannya saja, Maka permasalahan yang kemudian timbul adalah, apakah perangkat desanya tidak mengerti ataukah pemerintah yang tidak pernah mengerti akan esensi pembangunan desa, sehingga memaksakan programnya sendiri.

Dengan demikian, pemerintah (baik pusat, provinsi, kabupaten/ kota) seharusnya hanya mendorong dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di desa untuk mampu merencanakan pembangunan desanya, sehingga pemerintah pusat hanya melakukan pembiayaan berbagai program pembangunan yang di

ajukan oleh desa, Selama ini permasalahan tersebut selalu terjadi karena desa sendiri tidak memiliki konsep dalam merancang pembangunan desa dan tidak memahami akan eksistensi pembangunan desa berdasarkan keunikan dan kekhasan desa dengan memaksakan berbagai programnya.

#### 5.2.6. Pekerjaan

Terpenuhi kebutuhan masyarakat sangat ditentukan oleh terjadinya kesesuaian antara pendapatan dan pengeluaran. hal ini ditandai dengan tidak terbelinya barang konsumsi masyarakat oleh ketersediaan alat tukar (uang) sementara uang didapatkan dari pekerjaan yang menghasilkan. Belum terjadinya kesesuaian antara pendapatan dengan pengeluaran mengakibatkan kurangnya masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan karena masyarakat sibuk akan pekerjaan mereka.

**Tabel V.26 : Tanggapan Responden Tentang Pekerjaan Sehari-Hari Mereka Yaitu Bertani Atau Berkebun**

No	Jawaban Alternatif	Jumlah Responden	Persentase %
1	Sangat setuju	8	12,90
2	Setuju	22	35,48
3	Ragu-ragu	16	25,80
4	Tidak setuju	8	12,90
5	Sangat tidak setuju	8	12,90
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Tabel V.25 menggambarkan bagaimana pengaruh pekerjaan terhadap pembangunan desa. Dimana masyarakat yang mengatakan sangat setuju 8 orang (12,90%), yang mengatakan setuju 22 orang (35,48%) alasan karena masyarakat dalam jumlah banyak di Desa Balam Merah mengalami perbedaan sumber pendapatan sesuai dengan produktivitas kerja yang mereka lakukan, terjadinya

peningkatan terhadap pendapatan dalam penghasilan masyarakat akan dapat menentukan perkembangan tingkat kesejahteraan guna mencapai kehidupan yang layak, jika kehidupan sudah layak maka masyarakat akan mau ikut berpartisipasi. yang mengatakan ragu-ragu 16 orang (25,80%) 8 orang (12,90%) mengatakan tidak setuju dan yang mengatakan sangat tidak setuju 8 orang (12,90%) alasan mereka sangat tidak setuju masyarakat bisa bekerja yang lain tanpa hanya mengandalkan kebun dan bertani saja. Maka dapat disimpulkan faktor pekerjaan sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. apalagi masyarakat lebih banyak yang hidup bertani dari pada pegawai.

**Tabel V.27 : Tanggapan Responden Tentang Tidak Adanya Kerjasama Sesama Masyarakat Dalam Pekerjaan Untuk Pembangunan Desa**

No	Jawaban Alternatif	Jumlah Responden	Persentase %
1	Sangat setuju	12	19,35
2	Setuju	24	38,70
3	Ragu-ragu	10	16,12
4	Tidak setuju	10	16,12
5	Sangat tidak setuju	6	9,67
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel V.26. masyarakat yang mengatakan sangat setuju 12 orang (19,35%), yang mengatakan setuju 24 orang (38,70%) keterlibatan masyarakat dalam pembangunan akan membuahkan hasil yang cepat dirasakan apabila saling membantu dalam pembangunan apalagi jika para kaum pemuda dan masyarakat bersatu untuk membangun desa mereka, yang mengatakan ragu-ragu 10 orang, (16,12%) 10 orang (16,12%) mengatakan tidak setuju dan yang mengatakan sangat tidak setuju 6 orang (9,67%) pembangunan khusus harus menitik beratkan pada pembangunan daerah/desa tertinggal dengan fokusnya adalah untuk mengentaskan kemiskinan sehingga arah pembangunan harus

bermuatan strategi memadukan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan untuk mengentaskan kemiskinan dipedesaan perlunya kepedulian sesama masyarakat dalam kerjasama dalam pembangunan desa .

**Tabel V.28: Tanggapan Responden Tentang Pekerjaan Yang Apabila Dilakukan Dengan Disiplin Yang Tinggi Akan Mempengaruhi Partisipasi**

No	Jawaban Alternatif	Jumlah Responden	Persentase %
1	Sangat setuju	10	16,12
2	Setuju	19	30,64
3	Ragu-ragu	17	27,41
4	Tidak setuju	8	12,90
5	Sangat tidak setuju	8	12,90
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel V.27. masyarakat yang mengatakan sangat setuju 10 orang (16,12%), yang mengatakan setuju 19 orang (30,64%) pekerjaan yang dilakukan dengan disiplin disini adalah yaitu masyarakat didesa balam merah mayoritas hanya bekerjasampai jam sepuluh pagi sehingga kurang efektifnya pekerjaan mereka walaupun itu bertani, mereka kebanyakan membuang waktu saja dengan mereka nongkrong diwarung-warung untuk mencapai suatu tujuan atau untuk memotivasi, masyarakat harus bekerja sesuai kebutuhan yang dikeluarkan harus adanya keseimbangan sehingga tidak ada yang dilalaikan, yang mengatakan ragu-ragu 17 orang (27,41%) 8 orang (12,90%) mengatakan tidak setuju dan yang mengatakan sangat tidak setuju 8 orang (12,90%) alasan masyarakat mengatakan sangat tidak setuju adalah masyarakat yang kebanyakan nongkrong diwarung-warung untuk sekedar ngobrol atau ngopi itu salah mereka sendiri sebab mereka yang tidak mau menolong dirinya sendiri untuk lebih memajukan rumah tangganya dan desanya.

**Tabel V.29 : Rekapitulasi tanggapan Responden Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Apabila Dilihat Dari Pekerjaan Sehari-Hari Masyarakat Desa.**

No	Sub indicator	Kategori jawaban										N	%
		SS		S		R		TS		STS			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Jika dilihat Pekerjaan sehari-hari masyarakat	8	12,90	22	35,48	16	25,80	8	12,90	8	12,90	62	100
2	Tidak adanya kerjasama sesama masyarakat dalam pekerjaan untuk pembangun an desa	12	19,35	24	38,70	10	16,12	10	16,12	6	9,67	62	100
3	Pekerjaan yang apabila dilakukan dengan disiplin yang tinggi akan mempengar uhi partisipasi	10	16,12	19	30,64	17	27,41	8	12,90	8	12,90	62	100
Jumlah		30	16,12	65	34,94	43	23,11	26	13,97	22	11,82	186	100

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Jadi, dapat disimpulkan jika pekerjaan dimasyarakat itu sangat berpengaruh terhadap partisipasi pembangunan desa, jika pekerjaan mereka layak maka tingkat perekonomian mereka juga akan cukup tinggi. Maka dapat dilihat dari tabel diatas, yang mengatakan setuju bahwa pekerjaan sangat berpengaruh terhadap partisipasi pembangunan desa (34,94%%) dan yang mengatakan tidak setuju (13,97%).

Menurut Bapak Jamaludin selaku kepala Dusun (wawancara, agustus 2012) beliau mengatakan Pembangunan Desa pada hakekatnya merupakan pengakuan dan penghargaan dari semua pihak terhadap pemerintahan dan masyarakat desa dalam upayanya mencapai harapan dengan potensi, dan kekhasannya sendiri sehingga desa seyogyanya menjadi prioritas utama

pembangunan dari semua level pemerintahan. Strategi yang dilakukan dalam pencapaian target pembangunan yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan yang akan beraktivitas di desa keberhasilan konsep ini sangat tergantung kepada para pengambil kebijakan dan peran serta seluruh pemangku kepentingan terutama masyarakat Desa Balam Merah sendiri.

### 5.2.7. Organisasi Dan Manajemen

Hubungan pemerintah adalah hubungan yang terjadi antara yang dipemerintah dengan pemerintah satu terhadap yang lain pada suatu posisi atau peran. hubungan pemerintahan berfungsi sebagai pengikat, penghubung, dan pembatas antara pemerintah dengan yang diperintah. Melalui hubungan itu disalurkan informasi dari pihak satu ke pihak yang lain, perintah dari atas laporan dari bawah, dan seterusnya. Untuk mencegah pihak yang satu merugikan pihak yang lain, konflik dan membangun sinergi antar kelompok dibuat aturan main yang disepakati oleh semua pihak aturan main itu harus ditegakkan dalam hubungan itu pengurus wajib mengupayakan keadilan sosial bagi semua konsumen (publik) sebagaimana halnya dalam pencapaian suatu tujuan.

**Tabel V.30 : Tanggapan Responden Tentang Adanya Satuan-Satuan Organisasi Antara Masyarakat Dengan Pemerintah Supaya Tercapainya Tujuan Bersama**

No	Jawaban Alternatif	Jumlah Responden	Persentase %
1	Sangat setuju	15	24,19
2	Setuju	19	30,64
3	Ragu-ragu	22	35,48
4	Tidak setuju	4	6,45
5	Sangat tidak setuju	3	4,83
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel V.29. masyarakat yang mengatakan sangat setuju 15 orang (24,19%), yang mengatakan setuju 19 orang (30,64%) alasan mereka mengatakan setuju Ternyata lembaga-lembaga atau organisasi itu ada pula yang tumbuh menjadi alat-alat atau sarana-sarana bagi mediasi kepentingan masyarakat, termasuk pula kepada pemerintah. Terkait dengan hal itulah, adalah hal yang wajar saat ini jikalau pemerintah sendiri melihat hal ini dengan bijak serta baik sangka. Pemerintah harus pula siap menjadi lebih terbuka, akuntabilitas serta lebih transparan menghadapi iklim yang terjadi di masyarakat saat ini. Supaya terciptanya kebersamaan dalam berpartisipasi. Jadi dapat disimpulkan kalau organisasi dan manajemen yang baik dari pemerintah itu sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. yang mengatakan ragu-ragu 22 orang (35,48%) 4 orang (6,45%) mengatakan tidak setuju dan yang mengatakan sangat tidak setuju 3 orang (4,83%) menurut mereka yang mengatakan sangat tidak setuju urusan pembangunan desa tidak hanya urusan pemerintah saja tapi di perlukan turut campur tangan masyarakat apabila adanya organisasi dan manajemen yang tercipta di masyarakat jangan hanya untuk sebagian masyarakat yang tahu saja tapi juga untuk masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Dari kondisi tersebut, bermunculanlah lembaga-lembaga yang tumbuh di tengah masyarakat yang kebanyakan dari mereka hanya memikirkan nasib mereka sendiri tanpa memperdulikan sesamanya.



**Tabel V.31 : Tanggapan Responden Tentang Harus Adanya Dorongan Dari Pemerintah Untuk Masyarakat Dalam Partisipasi Pembangunan Desa**

No	Jawaban Alternatif	Jumlah Responden	Persentase %
1	Sangat setuju	8	12,90
2	Setuju	22	35,48
3	Ragu-ragu	16	25,80
4	Tidak setuju	8	12,90
5	Sangat tidak setuju	8	12,90
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel V.30. masyarakat yang mengatakan sangat setuju 8 orang (12,90%), yang mengatakan setuju 22 orang (35,48%) Berbagai rencana pembangunan yang dimiliki pemerintah semestinya sudah mulai mengajak partisipasi masyarakat. Karena tanpa didukung peran serta masyarakat, pembangunan yang dilaksanakan akan menjadi kurang efektif. Dari tahun ke tahun, proses pembangunan yang dilakukan pemerintah ternyata juga semakin dikritisi oleh masyarakat. Dan dampaknya, tumbuh bisa-bisa negatif dari masyarakat terhadap proses pembangunan yang sedang atau akan dilakukan. Salah satu gejala negatif yang muncul di tengah masyarakat, yakni tumbuhnya sebuah sikap yang apatis terhadap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Sekurang-kurangnya, ternyata masyarakat ada yang tidak peduli dengan proses pembangunan yang sedang dan akan dilakukan. Jadi dorongan dari pemerintah untuk masyarakat dalam partisipasi sangat diperlukan. yang mengatakan ragu-ragu 16 orang (25,80%) 8 orang (12,90%) mengatakan tidak setuju dan yang mengatakan sangat tidak setuju 8 orang (12,90%) alasan mereka mengatakan sangat tidak setuju adalah dia beranggapan masyarakat itu bisa menjalankan partisipasi pembangunan tanpa dorongan dan motivasi dari pihak luar karena yang tahu rumah mereka adalah orang yang tinggal didalam rumah itu bukan orang lain.

**Tabel V.32 : Tanggapan Responden Harus Terciptanya Pemerintahan Yang Baik.**

<b>No</b>	<b>Jawaban Alternatif</b>	<b>Jumlah Responden</b>	<b>Persentase %</b>
1	Sangat setuju	9	14,51
2	Setuju	21	33,87
3	Ragu-ragu	15	24,19
4	Tidak setuju	10	16,12
5	Sangat tidak setuju	7	11,29
<b>Jumlah</b>		<b>62</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan tabel V.31. masyarakat yang mengatakan sangat setuju 9 orang (14,51%), yang mengatakan setuju 21 orang (33,87%) Transparansi perlu dilakukan oleh pemerintah di berbagai tingkatan. Ini diperlukan bagi tumbuhnya iklim saling menghargai dan menghormati serta saling membantu antara masyarakat dengan pemerintah. Di samping itu, kalau hal ini mampu dilakukan maka akuntabilitas pemerintah akan terwujud dengan baik, yang mengatakan ragu-ragu 15 orang (24,19%), 10 orang (16,12%) mengatakan tidak setuju dan yang mengatakan sangat tidak setuju 7 orang (11,29%) pemerintah bisa menjadi lebih baik jika masyarakat juga ingin mengubah keinginannya untuk menjadi lebih baik, jadi terciptanya pemerintahan yang baik itu tergantung dari sisi mana masyarakat itu melihatnya.

**Tabel V.33 : Rekapitulasi tanggapan Responden Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Apabila Dilihat Dari Organisasi Dan Manajemen Yang Terbentuk Didesa**

No	Sub Indikator	Kategori jawaban										N	%
		SS		S		R		TS		STS			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Satuan-satuan organisasi antara masyarakat dengan pemerintah supaya tercapainya tujuan bersama	15	24,19	19	30,64	22	35,48	4	6,45	3	4,83	62	100
2	Dorongan dari pemerintah untuk masyarakat dalam partisipasi pembangunan desa	8	12,90	22	35,48	16	25,80	8	12,90	8	12,90	62	100
3	Harus terciptanya pemerintahan yang baik.	9	14,51	21	33,87	15	24,19	10	16,12	7	11,29	62	100
Jumlah		32	17,20	62	33,33	53	28,49	22	11,82	18	9,67	186	100

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Jika dilihat dari tabel diatas, yang mengatakan setuju bahwa faktor organisasi dan manajemen yang baik akan mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (33,33%) dan yang mengatakan tidak setuju (11,82%), Jadi dapat disimpulkan jika organisasi dan manajemen dimasyarakat itu sangat berpengaruh terhadap partisipasi pembangunan desa, jika adanya satuan-satuan organisasi antara masyarakat dengan pemerintah maka masyarakat akan setuju untuk ikut berpartisipasi agar tercapainya tujuan bersama.

### 5.3. Rekaputilasi Variabel Penelitian

Adapun rekapitulasi dari variabel penelitian tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan didesa dalam merah sebagai berikut :

**Tabel V.34. Rekapitulasi Jumlah tanggapan Responden Mengenai Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan**

No	Sub Indikator	Kategori Jawaban										N	%
		SS		S		R		TS		STS			
		F	%	F	%	F	%	F	%	F	%		
1	Faktor Ekonomi	27	2,07	71	38,17	46	24,73	23	12,36	19	10,21	186	100
2	Faktor Etnik (Budaya)	32	17,20	62	33,33	53	28,49	22	11,82	18	9,67	186	100
3	Sarana Dan Prasana	28	15,05	74	39,78	47	25,26	19	10,21	18	9,67	186	100
4	Faktor Pendidikan	31	16,66	64	34,40	42	22,58	28	15,05	21	11,29	186	100
5	Pelaksana (Pemerintah Desa)	25	13,44	67	36,02	50	26,88	25	13,44	19	10,21	186	100
6	Pekerjaan	30	16,12	65	34,94	43	23,11	26	13,97	22	11,82	186	100
7	Organisasi & Manajemen	30	16,12	62	33,33	53	28,49	22	11,82	18	9,67	186	100
	Jumlah	235	18.04	465	49.53	334	25.65	165	12.67	135	10.36	13.02	100

*Sumber : Hasil Penelitian 2012*

Berdasarkan hasil tanggapan responden dari tabel di atas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa di desa balam merah kecamatan bunut kabupaten pelalawan sebagaimana terlihat pada tabel rekapitulasi di atas bahwa rata-rata persentase sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi, dalam hal ini masyarakat setuju jika faktor ekonomi berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa rata-rata (38,17%).
2. Faktor etnik (budaya), dalam hal ini masyarakat setuju jika faktor budaya berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa rata-rata (33,33%)
3. Faktor sarana dan prasarana, dalam hal ini masyarakat setuju jika faktor sarana dan prasarana berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa rata-rata (39,78%)

4. Faktor pendidikan, dalam hal ini masyarakat setuju jika faktor pendidikan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa rata-rata (34,40%)
5. Faktor pelaksana atau administrator, dalam hal ini masyarakat setuju jika faktor pelaksana (pemerintah desa) berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa rata-rata (36,02%)
6. Faktor pekerjaan, dalam hal ini masyarakat setuju jika faktor pekerjaan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa rata-rata (34,94%)
7. Faktor organisasi manajemen, dalam hal ini masyarakat setuju jika faktor organisasi manajemen berpengaruh dalam pelaksanaan pembangunan desa rata-rata (33,33%)

**5.4. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dengan cara :**

1. Memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam arah pembangunan desa. Sebagai upaya memberdayakan masyarakat melalui pengembangan usaha ekonomi produktif sehingga dapat memberikan peningkatan pendapatan dan kesejahteraan keluarganya yaitu dengan mengadakan gotong-royong antara ibu rumah tangga dalam meningkatkan usaha ekonomi produktif tersebut.
2. Membuat program pembangunan yang bisa memacu semangat masyarakat program tersebut yaitu, Pengembangan usaha ekonomi rakyat Upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat perdesaan melalui kegiatan pelatihan paket usaha ekonomi produktif bagi masyarakat miskin terutama

Kepala Keluarga Perempuan, pemberian paket bantuan usaha dan pendampingan.

3. Strategi-strategi yang dilakukan dalam pencapaian target pembangunan yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan, pemangku kepentingan disini terutama kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD dan masyarakat desa itu sendiri, keberhasilan konsep ini sangat tergantung kepada para pengambil kebijakan dan peran serta seluruh pemangku kepentingan terutama masyarakat Desa Balam Merah sendiri.

Upaya yang keempat seharusnya Desa Balam Merah memiliki inisiatif sendiri untuk pembangunan desanya maka program yang dilakukan seharusnya pengajuan pembiayaan yang dilakukan oleh desa kepada pemerintah, misalnya untuk pembangunan infrastruktur fisik, pembangunan ekonomi dan kemasyarakatan, pendidikan, kesehatan, listrik, air, dan sebagainya, Dengan demikian, pemerintah (baik pusat, provinsi, kabupaten/kota) seharusnya hanya mendorong dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya saja. Tapi masyarakat harus mampu merencanakan pembangunan desanya sendiri, karena masyarakat desa itu sendirilah yang harus menjalankan semua program yang telah direncanakan.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta keterangan dari responden yaitu masyarakat Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan dapat diambil kesimpulan yaitu :

- a. Berdasarkan hasil penelitian dan tanggapan responden dilapangan, faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan didominasi oleh :
  1. Faktor sarana dan prasarana sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi tanggapan responden pada tabel V.33 rata-rata masyarakat setuju (39,78%).
  2. Faktor ekonomi juga yang sangat mempengaruhi mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. berdasarkan rekapitulasi tanggapan responden rata-rata masyarakat setuju (38,17%)tapi pada kenyataanya semua indikator pada tabel V.33 mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa tapi disini hanya mencantumkan yang paling dominan saja.
- b. Upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan partisipasi adalah merencanakan suatu program dengan matang sesuai dengan pembiayaan

yang telah diajukan pada pemerintah pusat supaya masyarakat termotivasi dan semangat untuk ikut berpartisipasi karena antara masyarakat dan pemerintah itu saling ketergantungan, pemerintah perlu dukungan dari masyarakat begitu pula masyarakat perlu dukungan dari pemerintah.

## 6.2 Saran

Selain itu sebagai pelengkap penulis juga mengemukakan saran-saran untuk menambah bahan masukan bagi pihak yang membutuhkan dan yang berkepentingan. Adapun saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah :

1. Diharapkan kepada aparat desa, perlunya memperhatikan manajemen kerjanya, membuat perencanaan yang baik agar semua sarana di desa dilengkapi agar masyarakat termotivasi untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa.
2. Masyarakat juga diharapkan partisipasinya dalam pembangunan ini, karena pembangunan pedesaan itu tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja tapi juga tanggung jawab masyarakat desa itu sendiri agar partisipasi pembangunan itu terlaksana maka masyarakat dan pemerintah harus menyatu sehingga terbangunnya motivasi antara masyarakat dan pemerintah barulah akan tercapai pembangunan yang maksimal.
3. Kepada pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan lagi mengenai pembangunan desa ini, baik dari segi biaya maupun yang lainnya yang berhubungan dengan proses pembangunan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Ach.Wazir Ws.,et al., ed. (1999). *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga SwadayaMasyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan Aus AID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- Alex s. Nitisemitro,1982 "*Partisipasi Masyarakat*", Gunung Agung, Jakarta.
- Bintoro tjokromiddjojo,1983,*Pengantar Administrasi Pembangunan*, LP3ES.
- Conyers, Diana. (1991). *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Irene Siti, Astuti Dwiningrum.(2011).*Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Isbandi Rukminto Adi. (2007). *Perencanaan Partisipatoris BerbasisAset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press
- Koentjaraningrat,1984, "*Masyarakat Desa Diindonesia*", Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.
- Kunarjo, 1997, *perencanaan otonomi luas dan pembiayaan pembangunan UI*, Jakarta.
- Labolo, muhadam, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori,Konsep, Dan Pengembangan*, PT Rajawali Pers, Jakarta.
- Lampiran daftar hadir musyawarah perencanaan pembangunan fisik Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.
- Lampiran surat undangan gotong-royong yang diadakan di Desa Balam Merah Kecamatan Bunut Kabupaten Pelalawan.
- Mikkelsen, Britha. (2011). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upayaPemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nasution, Zulkarnaen, 2002, *Komunikasi Pembangunan*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Nurcholis Hanif,2011, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta.
- Pasaribu I. L, dan simandjuntak1986. B, *Sosiologi Pembangunan*, Bandung.

- Raharjo, Dawam, 2000, *Esei-Esei Ekonomi Politik*, Jakarta.
- Riduan, 2007, *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian*, Penerbit : Alfabeta.
- Riwu kaho, Josef, 2010, *Prospek Otonomi Daerah Dinegara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Saifudin, 2009, *Partisipasi Public Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Saparin, 1997, *tata pemerintahan dan administrasi pemerintahan desa*, penerbit : Galia Indonesia, Jakarta.
- Siagian, Sondang p, 2000, *Administrasi Pembangunan*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Slamet, Y. 1994. *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*. Surakarta: SebelasMaret University Press.
- Soejono, soekamto, 2005, *Sosiologi Sebagai Suatu Pengantar*, Edisi Baru, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sugiono, 2007, *Metode Penelitian Administrasi Negara*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Sumampouw, Monique. (2004). “*Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasidengan Menggunakan Informasi Spasial yang Partisipatif*.” Jacub Rais, et al. *Menata Ruang Laut Terpadu*.
- Syaprizal, 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional WilayahIndonesia bagian barat*, prisma XXVI (3); 27-28.
- Thoha, Miftah. 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Umar Husein, 2004, *Metode Riset Ilmu Administrasi Negara*, Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Usman, suryoto, 2010, *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, Penerbit : Pustaka Pelajar.
- Wasistiono, Sadu, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Jakarta: Fokus Media.